

**LAPORAN PELAKSANAAN  
RISET PENGEMBANGAN & PENERAPAN (RPP)**



**JUDUL PENELITIAN  
MEMPERKUAT LOKALITAS KOTA SEMARANG  
DI ERA GLOBALISASI  
MELALUI DIPLOMASI LOKAL**

Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun

**TIM PENGUSUL:**

- |    |                                       |            |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1. | Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si | 0022046308 |
| 2. | Lusia Astrika, S.IP., M.Si            | 0008058501 |
| 3. | Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int.  | 0001078702 |

Dibiayai dengan Sumber Dana PNBPDIPA Universitas Diponegoro  
Nomor: SP DIPA – 042.01.2.400898/2016 Tanggal 7 Desember 2015  
Tahun Anggaran 2016

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2016**

## Halaman Pengesahan Riset Pengembangan dan Penerapan (RPP)

1. a. Judul Penelitian : Memperkuat Lokalitas Kota Semarang di Era Globalisasi melalui Diplomasi Lokal
- b. Bidang Penelitian : Ilmu Hubungan Internasional
2. Lama Penelitian : 8 bulan
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si.
  - b. Jenis Kelamin : P
  - c. Gol/Pangkat/NIP : 3c/196304221989032001
  - d. Fungsional : Lektor
  - e. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/S1-Hubungan Internasional
  - f. Pusat Penelitian : LPPM
4. Alamat Ketua Peneliti
  - a. Alamat kantor/Telp/Fax/Email : Jl. Prof. Sudarto, SH, Kampus Tembalang, Semarang  
Jl. Tlogosari I No. 44 A, RT 01/RW 01,
  - b. Alamat rumah/Telp/Fax/Email : Bulusan, Tembalang, Kota Semarang.  
Telp. 024 76482700
5. Anggota Peneliti : 1. Fendy Eko Wahyudi, S.I.P., M.Hub.Int. –  
: 0001078702  
: 2. Lusia Astrika, S.IP., M.Si - 0008058501
6. Pembiayaan
  - a. Tahun pertama : Rp. 40.000.000
  - b. Tahun kedua : Rp. 50.000.000
  - c. Tahun ketiga : Rp. 60.000.000

Semarang, 10 Nopember 2016

Mengetahui,  
Pimpinan Fakultas,

Ketua Peneliti,

Dr. Sunarto, M.Si  
NIP. 19660727 199203 1 001

Dra. Rr. Hermini Susiatingsih, M.Si  
NIP. 19630422 198903 2 001

Menyetujui  
Ketua LPPM  
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Rer. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.  
NIP. 197505291998021001

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR GRAFIK, TABEL, DAN GAMBAR.....	4
ABSTRAK .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	6
1.2 Tujuan Penelitian .....	7
1.3 Urgensi Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Hasil Penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka .....	9
1.6 Metodologi Penelitian .....	18
<b>BAB II DESKRIPSI KOTA SEMARANG .....</b>	<b>22</b>
2.1 Venice van Java.....	24
2.2 The Port of Java.....	26
2.3 Beauty of Asia .....	27
2.4 Outstadt atau Little Netherland .....	30
2.5 Kota Atlas.....	32
2.6 Kota Lumpia.....	32
2.7 Kota Jamu.....	32
<b>BAB III PARADIPLOMASI DALAM MEMPERKUAT LOKALITAS KOTA SEMARANG.....</b>	<b>38</b>
3.1 Lokalitas Kota Semarang sebagai Modalitas Paradiplomasi di Level Global.....	38
3.2 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Lokalitas dalam <i>Meetings, Incentives, Conferences, and Events (MICE)</i> .....	42
3.3 Prototipe Paradiplomasi Kota Semarang.....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>
Lampiran 1 Susunan Organisasi	
Lampiran 2 Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti	
Lampiran 3 Surat Pernyataan Ketua Peneliti	

## DAFTAR GRAFIK, TABEL DAN GAMBAR

Bagan	1.1 Alur Penelitian .....	18
Tabel	1.1 Kegiatan Penelitian .....	19
Tabel	2.1 Deskripsi Kota Semarang Menurut Data Kependudukan Periode 2013 – 2015.....	23
Gambar	2.1 Kota Semarang sebagai Venice Van Java.....	25
Gambar	2.2 Kota Semarang sebagai The Port of Java.....	26
Gambar	2.3 Keindahan Kota Semarang Bawah Dilihat Dari Kota Semarang Atas .....	27
Gambar	2.4 Keindahan Kota Semarang Bawah.....	28
Gambar	2.5 Kota Semarang sebagai Little Netherland.....	31
Tabel	2.2 Tata Guna Lahan Kota Semarang Tahun 2012 – 2015.....	33
Tabel	2.3 Realisasi Volume Ekspor Non Migas menurut Sektor (dalam Kuintal) .....	34
Tabel	2.4 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Semarang.....	34
Tabel	2.5 Data Jumlah Wisatawan Kota Semarang.....	35
Tabel	2.6 Pendapatan Daerah Kota Semarang Sektor Pariwisata.....	35
Tabel	2.7 Pemetaan Isu Utama di Setiap Urusan Pemerintahan Kota Semarang.....	36

## ABSTRAK

Globalisasi menyebabkan hampir semua lini kehidupan menjadi saling berhubungan. Orde Baru membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut melakukan hubungan dengan pihak luar, sebab dalam struktur pemerintahan di Indonesia, pemerintah daerah dinilai paling dekat dengan rakyat. Dengan demikian, berbagai isu kemanusiaan yang secara nyata mengancam keselamatan masyarakat tidak harus seluruhnya diselesaikan Pusat. Oleh sebab itu, diperlukan strategi diplomasi yang mampu mewedahi, mengolah, dan memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat daerah. Sebagai akademisi Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro, universitas negeri terbesar di Jawa Tengah, peneliti mengamati belum ada kerangka kerja sama Pemerintah Kota Semarang yang dirancang khusus berdasarkan hasil riset studi Hubungan Internasional. Sementara, diplomasi merupakan *core* hubungan internasional. Berangkat dari keadaan tersebut, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Kerja sama seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Semarang?; (2) Bagaimana memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi?; (3) Bagaimana model diplomasi yang mampu memperkuat lokalitas Kota Semarang?; serta (4) Seberapa jauh model diplomasi untuk memperkuat lokalitas Kota Semarang tersebut mampu mengatasi permasalahan Kota Semarang?

Penelitian ini akan dirancang dengan menggunakan rancangan penelitian dan pengembangan, atau R & D, yang terdiri atas 3 (tiga) tahap: Tahap pertama adalah tahap analisis kebutuhan. Tahap ke-dua adalah usulan pengembangan model diplomasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Tahap tiga adalah uji efektivitas model yang dikembangkan.

Penelitian tahap pertama ini diharapkan menghasilkan: (1) Gambaran tentang kebutuhan untuk memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi; (2) Gambaran diplomasi yang efektif dan fisibel dalam memperkuat lokalitas Kota Semarang; dan (3) Model diplomasi yang efektif dan fisibel dalam memperkuat lokalitas Kota Semarang; serta (4) Artikel hasil penelitian untuk publikasi nasional dan/atau internasional.

**Kata kunci:** globalisasi, lokalitas, diplomasi, paradiplomasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi mempengaruhi pergeseran fokus dalam hubungan internasional. Dinamika internasional pasca berakhirnya Perang Dingin telah mengubah sistem internasional, antara lain dalam hal isu dan aktor hubungan internasional. Jika sebelumnya Negara fokus pada isu-isu *high politics*, berakhirnya Perang Dingin mengharuskan Negara untuk mulai memperhatikan isu-isu yang bersifat *low politics* atau non-tradisional, yang secara nyata mengancam keselamatan masyarakat, seperti HIV/AIDS, kejahatan lintas negara, konflik etnis, ataupun pemanasan global.

Berkembangnya isu-isu global tersebut di atas mendorong terjadinya pergeseran aktor dalam sistem hubungan internasional, yang sebelumnya hanya didominasi oleh Negara, karena peran Negara saja tidak cukup dalam mengatasi isu-isu yang ada. Kemunculan aktor-aktor baru seperti *non-governmental organizations* (NGOs) dan *multinational corporations* (MNCs) menggeser pengaruh Negara dalam tatanan global, dimana Negara menjadi kurang dominan. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Luar Negeri merespon positif keterlibatan aktor-aktor lain di luar Negara untuk ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Diplomasi tidak hanya dalam ranah hubungan *government to government* saja, tetapi juga antara *government to non-government*, *non-government to non-government*, dan akhirnya kontak yang terbaru adalah antara *government to people* dan *people to people*. Globalisasi menyebabkan misi dan aktor diplomasi publik mengalami perluasan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kota Semarang adalah ibukota Propinsi Jawa Tengah, dan merupakan satu-satunya kota di Propinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibukota propinsi, Kota Semarang

dijadikan sebagai parameter kemajuan kota-kota lain di Propinsi Jawa Tengah (ciptakarya.pu.go.id, 2016). Namun, pada kenyataannya, layaknya kota-kota besar lain di Indonesia, Kota Semarang juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti banjir, penurunan kualitas air tanah, timbulan sampah, tercemarnya air sungai oleh limbah industri, serta buruknya kondisi jalan yang menghubungkan jalur utama.

Di era globalisasi saat ini, pemerintah daerah perlu menjalin kerja sama dengan berbagai aktor untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya, termasuk dengan aktor luar negeri. Karena, di masa sekarang ini, tidak ada negara yang dapat hidup sendiri. Hubungan internasional membantu negara mencapai tujuan negara, dan menciptakan perdamaian positif. Tetapi, di sisi lain, hubungan internasional yang semakin marak juga dapat mengancam lokalitas.

Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha sadar dan berbasis riset untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas. Program Studi Hubungan Internasional merupakan salah satu program studi baru di lingkungan Universitas Diponegoro, yang memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di level lokal. Selama ini, konsep-konsep yang dipelajari dalam Ilmu Hubungan Internasional dianggap sulit untuk membumi dengan kondisi di akar rumput. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model diplomasi yang mampu menjaga lokalitas Semarang, serta menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah yang bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Kota Semarang.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi diplomasi yang kompatibel dengan konsep lokalitas, sehingga dapat memperkuat lokalitas di era globalisasi. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran terkait tantangan globalisasi terhadap lokalitas Kota Semarang;

2. Untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi;
3. Untuk mengidentifikasi model diplomasi yang efektif dan efisien dalam memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi.

### **1.3 Urgensi Penelitian**

Setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadikan penelitian ini urgen untuk segera dilakukan. Pertama, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai permasalahan secara nyata mengancam keselamatan masyarakat, seperti permasalahan kesehatan, pendidikan, pemanasan global, dan lain sebagainya. Kedua, Negara bukan lagi satu-satunya aktor yang bertanggungjawab mengatasi berbagai isu yang mengancam keselamatan masyarakat. Dengan adanya globalisasi, muncul aktor-aktor baru selain Negara dalam hubungan internasional. Terakhir, menanggapi munculnya berbagai pergeseran akibat globalisasi, penting untuk mengidentifikasi diplomasi yang kompatibel dengan konsep lokalitas, sehingga dapat semakin memperkuat lokalitas di era globalisasi, dan bukan sebaliknya.

Keunikan penelitian ini terletak pada lokalitas dalam globalisasi. Sebagai salah satu program studi di universitas negeri paling besar di Jawa Tengah, peran Program Studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dalam membantu menyelesaikan permasalahan di akar rumput dengan berbasis riset sangat dibutuhkan. Dengan adanya penelitian ini, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dapat ikut berperan dalam mewujudkan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Diponegoro, yakni “Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Indonesia untuk Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kemandirian Pasokan Pangan, Air, dan Energi yang Berkelanjutan serta Perluasan Produk-produk Unggulan dan Penambahan Nilai Produksi”.



#### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

a. Pengembangan Akademis

Belum banyak penelitian yang menghubungkan antara teori-teori yang mengkaji tentang daerah (internal/domestik) dengan teori-teori hubungan internasional (eksternal), karena secara konvensional, kedua obyek teori tersebut berbeda. Namun, sesuai perkembangan, teori-teori tersebut ternyata dapat digunakan secara komplementer. Dengan menggunakan kedua ranah teori tersebut dalam penelitian tentang lokalitas dengan hubungan internasional ini, maka dapat membuka wacana akademik bahwa perkawinan antar teori yang berbeda menjadi alat untuk menjawab permasalahan dan perkembangan dinamika kehidupan.

b. Kepentingan Praktis

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan, baik pemerintah Pusat, Daerah, organisasi bisnis maupun masyarakat bahwa mereka secara institusi maupun perseorangan dapat bertindak sebagai alat diplomasi dalam hubungan internasional.

c. Kepentingan Pembangunan (Daerah)

Penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi Daerah dalam melakukan program-program pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusianya. Sebab, dengan menempatkan rakyat dan Daerah sebagai alat diplomasi dalam kancah pergaulan internasional, maka dalam bersikap, bertindak dan berpikir harus mengingat dan mendasarkan diri pada kepentingan nasional Indonesia.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Demokrasi dengan desentralisasi adalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Banyak definisi demokrasi, salah satu diantaranya adalah yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln (dalam pidato politiknya pada tanggal 19 November 1863): “*Democracy is government of the people, by the people, and for the people*” (abrahamlincolnonline.org, 2015). Definisi atau frasa demokrasi ini begitu sangat terkenal sehingga di kemudian hari (bahkan hingga kini) masih

sering dikutip dan digunakan oleh banyak ahli. Adapun jika mendasarkan pada definisi yang disampaikan Bryan A. Garner (1999, 444), yaitu demokrasi adalah “...government by the people, either directly or through representatives”, maka tipe demokrasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *Direct Democracy* dan *Indirect Democracy*.

*Direct Democracy* dapat dipandang sebagai demokrasi yang senyatanya atau yang ideal, karena pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat itu betul-betul direalisasikan. Namun karena beberapa hal, di abad modern ini, demokrasi langsung (yang dikenal juga sebagai Demokrasi Athena) tidak lagi praktis, layak ataupun memungkinkan untuk diterapkan. Beberapa faktor penyebab diantaranya adalah masalah jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, serta perkembangan kehidupan manusia dengan permasalahan yang begitu cepat, beragam dan sangat dinamis menyebabkan kepedulian serta tingkat partisipasi politik rakyat berkurang. Kondisi ini melahirkan aliran baru dalam demokrasi, yang disebut sebagai *New Democracy*, *Modern Democracy*, *Representative Democracy* atau *Indirect Democracy*.

Dalam *Indirect Democracy*, rakyat tetap dilibatkan secara langsung dalam pemilihan pemimpin-pemimpinnya (*direct elections, direct democracy*), namun setelah para pemimpin terpilih dan menduduki jabatan-jabatan publik (presiden-wakil presiden, kepala daerah dan parlemen, baik di Pusat maupun Daerah), maka setiap tindakannya harus merupakan representasi dari rakyat (*Representative Democracy*) (Ekins, 2009, 1). Adapun yang disebut rakyat dalam demokrasi itu adalah meliputi semua warga negara, tidak terkecuali adalah warga negara yang tinggal dan menetap di wilayah yang jauh dari Pusat. Sedangkan dalam sebuah negara yang berbentuk kesatuan, dengan sebaran penduduk dan wilayahnya yang luas, menyebabkan pemerintahan Pusat sebagai representasi dari seluruh rakyat dari sebuah negara, akan menjadi tidak berdaya dan tidak efektif-efisien untuk menjangkau dan mengurus secara langsung beberapa urusan rakyat yang bersifat lokalitas dan jauh dari Pusat.

Jangkauan Pusat terhadap lokal yang dibatasi oleh jarak yang jauh, biaya yang mahal, dan memerlukan waktu yang lama serta berkembang dan beragamnya

kebutuhan rakyat yang begitu cepat dan sangat dinamis, menjadi penyebab permasalahan ini. Dalam kondisi seperti ini, lantas bagaimanakah demokrasi perwakilan dapat berjalan di tingkat lokal (*local representative democracy*)? Disinilah diperlukan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan lokal dengan mendasarkan diri pada prinsip demokrasi-desentralistik, yaitu suatu sistem pemerintahan lokal yang diselenggarakan secara *local representative democracy system*, dengan menggunakan alat desentralisasi dan otonomi daerah dalam mencapai tujuan.

Perlunya pemerintahan lokal yang mendasarkan pada demokrasi representatif dengan alat desentralisasi dan otonomi daerah (*local representative democratic-desentralistic system*) adalah dengan alasan bahwa: *Pertama*, rakyat lokal adalah pemilik kedaulatan, sehingga pemerintahan lokal juga harus dilakukan secara demokratis representatif, yaitu melalui lembaga-lembaga publik yang para pejabatnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu serta bertindak atas nama dan untuk kepentingan rakyat lokal. Senada dengan pernyataan tersebut adalah pendapat Timothy D. Sisk, dkk (2001, 11), yaitu: “...*inhabitants of a given area have the right and responsibility to make decisions on those issues that affect them most directly and on which they can make decisions.*”

*Kedua*, untuk kepentingan terwujudnya pemerintahan lokal yang demokratis sebagaimana disebut di atas, *desentralisasi* digunakan sebagai alat bagi tercapainya tujuan tersebut. Sebab, kedekatan secara fisik dan non fisik antara rakyat dengan pemerintah lokal, maka pemerintah lokal dinilai menjadi lebih paham akan kondisi rakyat dan daerahnya dengan segala kelemahan, kelebihan, peluang dan ancaman yang ada. Sebaliknya, Pemerintah Pusat berada pada posisi yang sulit, tidak akan mampu serta akan bekerja secara tidak efektif dan efisien untuk mengatasi beberapa urusan yang bersifat lokalitas.

Menyikapi permasalahan di atas, maka Pusat diharuskan melimpahkan kekuasaan kepada pemerintah lokal (desentralisasi) dan dari desentralisasi ini melahirkan hak pemerintah lokal untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Timothy D. Sisk, et al., (2001, 11) menyebutkan hal ini dengan pernyataannya, yaitu: “*Central to any meaning of local democratic governance is*

*the concept of self-government and administration closest to the people*". Namun apa dan bagaimana konsep desentralisasi itu hingga kini masih menjadi perdebatan banyak ahli dan bahkan mereka mengatakan perdebatan itu tidak akan dapat berakhir (Conyer, 1983). Kontekstual perdebatan berkisar tentang adanya 2 tipe desentralisasi, yaitu *political decentralisation perspective* dan *administrative decentralisation perspective*.

Beberapa definisi desentralisasi dapat disampaikan dari pandangan Mawhood (1987: 9) yang mengatakan bahwa desentralisasi adalah "... *devolution of power from central to local governments*". Nampak tidak adanya perbedaan dengan definisi yang dirumuskan oleh Smith (1985), yaitu bahwa desentralisasi sebagai "... *the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a large organisation.*" Persamaan dari kedua definisi tersebut terlihat pada perspektif yang digunakan, yaitu *political perspective*. Definisi ini akan berbeda dengan yang disampaikan Rondinelli dan Cheema (dalam Syarif, 2008), yang mendefinisikan desentralisasi melalui *administrative perspective*, yaitu:

"Decentralisation is the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from central government to its field organisations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organisations, local government, or non-government organisations."

Makna yang dapat diambil dari perdebatan ini adalah bahwa perbedaan dua perspektif konseptual desentralisasi tersebut akan berpengaruh terhadap ruang dan batas kewenangan lokal yang diberikan Pusat kepada Daerah dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya.

Namun terlepas dari perdebatan tersebut, secara mendunia, saat ini paham desentralisasi menjadi *trend in local government* dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal dan diadopsi serta didorong oleh dunia internasional untuk diterapkannya dalam pemerintahan lokal, sebagaimana disampaikan oleh Timothy D. Sisk, et al., (2001, 11) sebagai berikut:

"At both regional and national levels, international organizations and multilateral groups have adopted standards for national governments to devolve decision-making to the level closest to the people as a means of

giving meaning to democratic principles. These norms help shape the international obligations of countries to foster local democracy”.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berazaskan atau beralatkan desentralisasi dalam mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis, adalah karena adanya kekuatan yang ada dalam desentralisasi.

Syarif (2008) dengan mengutip pendapat beberapa ahli, menyebutkan bahwa bagi daerah, desentralisasi: 1) dapat mewujudkan *political equality*. Dengan desentralisasi, rakyat dan Daerah dapat dengan elegan mempraktikkan bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan, dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan; 2) dapat menciptakan *local accountability*. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah; dan 3) dapat menciptakan *local responsiveness*. Asumsi dasar bahwa pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, maka pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

Adapun dalam tujuan desentralisasi menurut perspektif desentralisasi administrasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and services*, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah, sebagaimana disampaikan oleh Rondinelli (1983, 4 dalam Syarif, 2008). Jika Rondinelli menekankan pada aspek pemerintah, maka Ruland (1992, Syarif, 2008), lebih menekankan aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama desentralisasi, sehingga Ruland memberikan definisi sebagai berikut: “*Decentralisation, as a corollary local autonomy, is seen as a positive contribution to increase people participation, which would eventually lead to socio-economic development*” (1992, 3).

Dengan singkat kata dapat disimpulkan bahwa terwujudnya kepentingan daerah terhadap desentralisasi, maka tujuan demokrasi lokal dapat dicapai, yaitu (1) meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik, (2) meningkatkan akuntabilitas publik dan (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pusaran arus globalisasi menjadi tantangan yang serius bagi negara dan pemerintah, tidak terkecuali pemerintah lokal. Kerjasama internasional menjadi salah satu alat untuk menyikapinya. Dengan kata lain, Daerah dapat terlibat dalam hubungan kerjasama lintas negara dan kerjasama tersebut tidak hanya untuk kepentingan lokal tetapi secara nasional. Lokalitas dapat ditempatkan sebagai instrumen diplomasi lokal dalam hubungan internasional.

Secara sederhana, Collins English Dictionary mendefinisikan lokalitas (*locality*) sebagai suatu lingkungan (*neighborhood*), tempat, atau wilayah. Lokalitas ini, pada akhirnya membentuk identitas individu atau masyarakat yang ada di dalamnya. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945, Negara memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Di sinilah, diplomasi lokal diperlukan.

Dalam sistem internasional, kata "diplomasi" bukan istilah asing. Diplomasi merupakan salah satu sarana negara dalam melaksanakan hubungan antar negara. Diplomasi seringkali dikaitkan dengan diplomat, karena jika dilihat dari sejarahnya, fungsi diplomat dianggap sebagai penentu baik-buruknya hubungan antar negara. Namun, fungsi dan peran tersebut kemudian mengalami pergeseran seiring dengan berkembangnya diplomasi karena ternyata setiap orang dapat berdiplomasi dan membahas permasalahan-permasalahan internasional, tanpa harus terlebih dahulu menjadi diplomat.

R. P. Barston (2006) menjelaskan bahwa sistem internasional mempengaruhi perkembangan diplomasi. Tidak ada yang pernah menyangka Perang Dingin akan berakhir dan membawa banyak perubahan di dunia ini, seperti terbentuknya negara-negara baru, pergeseran aktor dalam sistem hubungan internasional, serta munculnya isu-isu yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian karena masyarakat terlalu sibuk mengurus perang. Perubahan-perubahan

tersebut mendorong terjadinya evolusi diplomasi, yang dapat dilihat dari bertambahnya jumlah kunjungan perwakilan negara, pengambilan keputusan dalam institusi internasional, pembahasan isu-isu baru terutama yang bertemakan humaniterianisme, dan forum berskala internasional lainnya.

Diplomasi merupakan salah satu cara Negara mencapai politik luar negeri, sehingga kepentingan nasional dapat dipenuhi. Hingga awal abad ke-21, berbagai urusan luar negeri masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kementerian luar negerinya. Namun, Negara (dalam hal ini pemerintah pusat) tidak lagi menjadi satu-satunya aktor diplomasi. Muncul aktor-aktor lain di luar Negara, seperti *non-governmental organizations* (NGOs) dan perusahaan multinasional. Kemunculan aktor-aktor baru tersebut mendorong Rogier van der Pluijm dan Jan Melissen (2007) untuk mengkaji aktor diplomasi lain yang tidak kalah penting, yakni kota atau lokal. Menurut van der Pluijm dan Melissen, peran kota perlu diperhitungkan di era globalisasi saat ini. Melalui tulisannya yang berjudul “*City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics*”, keduanya memperkenalkan konsep baru yang dikenal dengan *city diplomacy*, atau diplomasi lokal, atau paradiplomasi<sup>1</sup>.

Diplomasi lokal adalah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan aktor-aktor internasional lainnya, dimana tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan daerah (van der Pluijm & Melissen, 2007, 6). Warga negara tidak dapat disebut sebagai aktor dari diplomasi lokal, kecuali tergabung dalam gerakan sosial yang memang mewakili kota secara keseluruhan. Berdasarkan definisi tersebut, diplomasi lokal dapat juga dianggap sebagai salah satu bentuk desentralisasi pengelolaan hubungan internasional, karena Kota adalah aktor utamanya. Dalam banyak kasus, walikota adalah aktor yang seringkali diberi tanggung jawab untuk menjalankan hubungan luar negeri kotanya.

Segala hubungan luar negeri yang dijalankan Kota harus tetap mengacu pada politik luar negeri. Proses diplomasi Negara dan Kota akan berubah seiring

---

<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, istilah diplomasi lokal dan paradiplomasi akan digunakan secara bergantian.

dengan perubahan tujuan politik luar negeri. Dengan demikian, Negara dan Kota seakan berada pada rute yang sama, tetapi beda mobil. Negara dan Kota sama-sama terlibat dalam aktivitas diplomatik bukan untuk memperebutkan lahan yang sama, tetapi untuk saling melengkapi (van der Pluijm & Melissen, 2007, 12). Karena, Negara tidak lagi mampu menjalankan seluruh aktivitasnya sendiri, dan aktor seperti Kota perlu terlibat.

Berangkat dari *self-interest* ini, Kota menjalin kerja sama dalam hubungan internasional, salah satunya melalui *sister city*. Tidak dapat dipungkiri, aktivitas diplomasi lokal didorong oleh *self-interest* suatu Kota. Aspek keamanan, pembangunan, ekonomi, kultural, atau pun peningkatan jaringan dan kerja sama, dapat dicapai dengan melakukan diplomasi. Namun, sebagai suatu konsep baru, diplomasi lokal (atau yang juga biasa disebut sebagai *paradiplomacy*) dalam praktiknya menghadapi tantangan, sehingga mempengaruhi jalannya kerja sama. Kerja sama melalui diplomasi lokal tidak mencapai hasil yang maksimal ketika Pusat dan Daerah tidak mampu menciptakan sinergi kerja sama yang baik, sehingga kepentingan dan tujuan seringkali *overlap* (van der Pluijm & Melissen, 2007, 34). Dengan demikian, kerja sama antara Pusat dan Daerah dibutuhkan demi mewujudkan tujuan nasional di tingkat lokal; yang pada gilirannya juga akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Provinsi Jawa Tengah sendiri telah memiliki beberapa kerja sama internasional yang sifatnya antar provinsi, antara lain dengan Provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok, dimana kerja sama ini sudah terjalin relatif cukup lama. Dalam skema kerja sama yang lebih kecil, tiga kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki kerja sama *sister city*, yakni Semarang, Surakarta, dan Bumiayu. Dari tiga wilayah tersebut, menyadari Semarang sebagai kota yang memiliki sarana prasarana transportasi (laut dan udara) bertaraf internasional, peneliti terdorong untuk memfokuskan pembahasan di Kota Semarang. Dalam era globalisasi seperti saat ini, kota-kota besar seperti Semarang memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan lokalitas seiring dengan berubahnya zaman. Di sisi lain, guna meningkatkan kapasitasnya dan juga dengan



pertimbangan aspek efisiensi, Kota perlu mencari mitra luar negeri yang dapat diajak bekerjasama.

Selama ini, penelitian-penelitian yang ada hanya membahas tentang apa dan bagaimana kerja sama, implementasi, strategi, evaluasi dan efektivitas kerja sama *sister province* atau *sister city*. Beberapa penelitian yang dimaksud, di antaranya seperti yang dilakukan oleh Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY (2006), Reni Windiani (2013); Hermi (2013); Yandu Setiya Mukti (2013); Budiari Niluh Wayan (2013); dan Alamsyah Anidu, dkk (2014). Sementara, belum ada penelitian yang dengan sengaja mengamati bagaimana model kerja sama *sister city* juga dapat menjadi instrumen diplomasi dalam memperkuat lokalitas di tengah arus globalisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Anthony Giddens (1990, 64), globalisasi merupakan “*the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away, and vice versa*”. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya baik dan penting, tetapi juga memiliki urgensi, karena diperlukan kajian yang mampu menghubungkan variabel-variabel tersebut sebagai upaya menghadapi arus dan tantangan globalisasi, serta untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan rakyat Daerah yang berkembang sangat dinamis dan variatif.

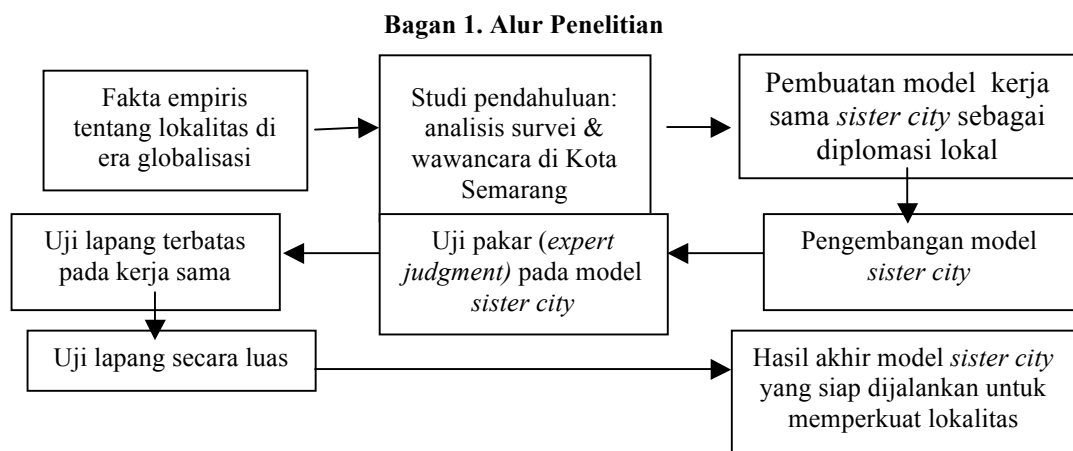
Lebih lanjut, berangkat dari pendapat Timothy D. Sisk, dkk (2001, 21) yang menyebutkan bahwa “*At both regional and national levels, international organizations and multilateral groups have adopted standards for national governments to devolve decision-making to the level closest to the people as a means of giving meaning to democratic principles. These norms help shape the international obligations of countries to foster local democracy*”, penelitian ini bertujuan mengajak Hubungan Internasional untuk lebih peduli dan berkontribusi terhadap urusan-urusan lokal.

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Prosedur Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah bagian penelitian *multiyears*, yang rencananya akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Pada tahun pertama, penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengembangkan kerja sama di tingkat Daerah. Deskripsi ini berfungsi sebagai landasan penelitian tahun kedua, yang bertujuan untuk mengembangkan *sister city*, sehingga kerja sama tersebut memiliki manfaat dan visibilitas yang efektif. Efektivitas model yang dikembangkan tersebut akan diuji pada penelitian tahun ketiga. Dengan penelitian yang bertahap, penelitian ini dapat membantu menciptakan kerja sama yang berkualitas dan memberi manfaat, atau memperkuat lokalitas di era globalisasi.

Secara sederhana, gambaran prosedur pelaksanaan ketiga penelitian dapat dilihat pada Bagan 1.1 dan Tabel 1.2 berikut:



**Tabel 1.2 Kegiatan Penelitian**

No.	Tahap	Kegiatan	Luaran Kegiatan (Indikator)
1.	Analisis kebutuhan	Survei tentang pengaruh globalisasi terhadap lokalitas Kota Semarang, dan identifikasi model <i>sister city</i> sebagai diplomasi lokal, antara lain melalui wawancara.	- Gambaran tentang kebutuhan <i>sister city</i> sebagai diplomasi lokal - Publikasi
2.	Usulan pengembangan model	Pengembangan <i>sister city</i> berdasarkan hasil analisis kebutuhan.	- Draf pengembangan skenario <i>sister city</i> - Publikasi
3.	Uji efektivitas model yang dikembangkan	1. Uji pakar 2. Uji lapang terbatas 3. Uji lapang secara luas	- Draf <i>sister city</i> yang sudah direvisi berdasar uji pakar, uji lapang terbatas, dan uji lapang secara luas - Draf akhir - Publikasi

Berdasarkan bagan dan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masalah penelitian yang akan dipecahkan pada **Tahap I** adalah bagaimana lokalitas Kota Semarang di era globalisasi saat ini, dan bagaimana kerja sama di tingkat daerah selama ini dilakukan. Lebih lanjut, pada tahap ini, selain mengamati kerja sama yang sudah ada di Kota Semarang, peneliti juga akan mengkaji kerja sama *sister city* di daerah lain, seperti Surabaya. Kedua poin tersebut akan digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan diplomasi lokal dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Semarang. Dengan demikian, target utama penelitian ini adalah hasil analisis kebutuhan, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk penelitian Tahap II.

Pada penelitian **Tahap II**, permasalahan yang akan ditangani adalah pengembangan kerangka kerja sama *sister city* di Kota Semarang, berdasarkan analisis kebutuhan. Sehingga, penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam membantu Daerah menyelesaikan permasalahan yang ada, serta membantu memperkuat lokalitas di era globalisasi.

Terakhir, pada penelitian **Tahap III**, akan dilakukan uji efektivitas terhadap model yang dikembangkan. Rancangan penelitian yang digunakan pada

tahap ini adalah rancangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), yang di dalamnya terdapat uji pakar dan uji lapang terbatas dan uji lapang secara luas. Terhadap kerangka kerja sama yang sudah direvisi berdasar penilaian penguji atau para ahli, akan dilakukan uji lapang. Uji lapang ini terdiri atas uji lapang terbatas dan uji lapang secara luas. Subyek pengguna terbatas adalah Pemerintah Kota Semarang itu sendiri, selaku pemangku kebijakan. Sedangkan untuk uji lapang secara luas akan dipilih tiga kelompok masyarakat yang berada di bawah kerangka kerja sama. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya kerangka kerja sama *sister city* sebagai upaya memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi.

### **1.6.2 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tim peneliti merupakan subyek kunci dalam penelitian ini, yang bertugas mencari data dalam tahapan penelitian survei dan mengembangkan kerja sama yang dimaksud, berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Kedua, Kota Semarang, merupakan subyek untuk pengembangan diplomasi lokal melalui *sister city*. Ketiga, pakar dalam bidang demokrasi-desentralistik dan diplomasi lokal merupakan subyek yang dilibatkan dalam proses validasi kerja sama yang dihasilkan.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden, dengan menggunakan metode tertentu (Silalahi, 2006, 257). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara. Melalui metode studi pustaka, data-data dalam penelitian didapatkan dari literatur berupa buku-buku, buletin cetak, serta sumber-sumber artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Lebih lanjut, guna mendapatkan pengetahuan langsung dari lapangan, peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara. Sasaran utama dari wawancara adalah Pemerintah Kota Semarang. Wawancara akan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi: a) menentukan subjek atau informan yang diwawancarai,

b) mempersiapkan wawancara, c) melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif, dan d) menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman hasil wawancara.

#### **1.6.4 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif; dimana peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Miles dan Huberman yang menegaskan bahwa analisis data kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Silalahi, 2006, 257). Tahap reduksi data merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan berbagai data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Setelah tahap mereduksi data, peneliti lanjut pada tahap penyajian data, dimana peneliti mengorganisir data yang telah direduksi, disusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan mempermudah peneliti merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Langkah yang terakhir yakni menarik kesimpulan berdasarkan temuan, dan melakukan verifikasi data.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI KOTA SEMARANG**

Kota Semarang, yang berdiri pada tanggal 2 Mei 1547 dan saat ini telah memasuki usia ke-469 tahun, merupakan salah satu kota metropolitan dan terbesar ke kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Posisi ini dapat dimengerti karena Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah. Kota yang letak wilayahnya dikelilingi oleh beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan, memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan, dan Barat menuju Kabupaten Kendal.

Dengan demikian maka dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara (dengan bandara bertaraf internasional) yang merupakan potensi bagi simpul transportasi tidak hanya dalam lingkup Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah, melainkan internasional (khususnya negara-negara ASEAN). Kondisi ini menjadi penting dan kekuatan sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah dalam rangka hubungan dengan luar Jawa dan luar negeri di era globaisasi yang tidak mengenal batas, ruang dan waktu ini.

Adapun terkait dengan aspek kependudukan, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk hampir mencapai 1,6 juta jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, seperti Jawa, Chinese dan Arab, dengan luas wilayah sebesar 373,80 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dalam hal perkembangan terkait kependudukan ini, dapat dikatakan relatif stabil dalam periode waktu

selama 3 tahun terakhir dari tahun 2015. Detail gambaran Kota Semarang menurut data kependudukan dapat terbaca dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Deskripsi Kota Semarang Menurut Data Kependudukan Periode 2013 - 2015

<b>Indikator Perkembangan Penduduk Kota Semarang</b>				
<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	1.572.105	1.584.906	1.595.187
2. Pertumbuhan Per Tahun	Persen	0,83	0,97	0,59
3. Kepadatan	Per Km2	4.207	4.241	4.269
4. Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	442.089	443.541	471.327
5. Rata-rata Anggota Rumah Tangga	Jiwa	3,56	3,57	3,38
6. Rasio Jenis Kelamin	Per 100 Pddk	99	99	99
7. Tingkat Kelahiran Kasar	Per 1000 Pddk	15,18	15,63	14,22
8. Tingkat Kematian Kasar	Per 1000 Pddk	6,55	6,80	6,77
9. Tingkat Migrasi Masuk	Per 1000 Pddk	19,40	21,03	20,50
10. Tingkat Migrasi Keluar	Per 1000 Pddk	19,47	20,36	21,59
11. TPAK Laki-laki	Persen	80,15	81,97	78,54
12. TPAK Perempuan	Persen	56,11	55,72	56,09

**Sumber : BPS Kota Semarang**

**Keterangan: \*) Tahun 2009 TPAK 15 th keatas**

Pada Tabel 2.1 dapat disebutkan bahwa dalam hal kependudukan pada periode 2013 – 2015 tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena berada pada suatu kondisi dan trend perkembangan dan atau penurunan yang tidak tergolong ekstrem, kecuali pada indikator jumlah rumah tangga. Kondisi ini dapat dinilai bahwa dalam hal mengelola perkembangan kependudukan, Kota Semarang dikategorikan berhasil. Keberhasilan pengelolaan kependudukan sangat vital karena akan berpengaruh besar terhadap aspek kehidupan lainnya, khususnya bidang ekonomi, kesehatan, dan pengangguran.

Kota Semarang ini semakin menjadi penting dan layak untuk diperhitungkan mengingat keberadaannya secara topografi yang sangat menguntungkan sehingga dapat mendorong Kota Semarang menjadi kota pariwisata yang diperhitungkan oleh tidak hanya wisatawan domestik saja tetapi juga internasional. Dengan demikian maka akan dapat meningkatkan pendapatan

(asli) daerah sebagai penopang pembangunan dan kesejahteraan rakyat di era desentralisasi dengan otonomi yang berprinsip “seluas-luasnya dan bertanggung jawab” yang ditekankan pada Era Reformasi ini. Kota yang berada di dataran rendah dan dikelilingi oleh beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan, secara topografi wilayahnya terdiri atas wilayah pegunungan/perbukitan (dengan ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut) dan pantai (dengan ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut). Kota ini juga disebut memiliki wilayah yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian wilayah yang dikenal sebagai Kota Atas dan bagian wilayah lain yang disebut sebagai Kota Bawah. Lebih dari itu, karena keberagaman dan keunikan yang dimilikinya, maka berbagai sebutan nama untuk Kota Semarang juga menjadi beragam.

Diluar karena keuntungan topografisnya, keberagaman, keunikan dan sejarah yang dimilikinya menjadikan Kota Semarang memiliki beragam nama yang cukup menarik serta layak dan *marketable* untuk “dijual”, di antaranya yaitu:

## **2.1 Venice Van Java**

Di beberapa negara di dunia memiliki kota dengan sebutan venesia (yang berarti sungai atau kanal), diantaranya seperti Venesia-Itali. Kota Semarang juga dikenal sebagai “Venice Van Java”. Nama ini diberikan dengan dasar pemikiran bahwa karena terdapatnya banyak sungai dan kanal (yang merupakan salah satu sarana transportasi yang diandalkan pada masa kependudukan Belanda di Semarang) melintasi tengah Kota Semarang. Beberapa photo dibawah ini merupakan gambaran Kota Semarang sebagai “Venice Van Java” sebagaimana dimaksud.



## 2.2 The Port of Java

Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, pemerintah kota Semarang memberikan julukan The Port of Java "Pelabuhan-nya Jawa". Hal tersebut sebagai upaya pencitraan Kota Semarang sebagai pusat pelabuhan di Pulau Jawa dengan Tanjung Emas-nya. Apalagi di jaman dahulu, Kota Semarang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara yang sangat ramai. Beberapa photo dibawah ini menggambarkan Kota Semarang sebagai The Port of Java.

Gambar 2.2  
Kota Semarang sebagai The Port of Java  
Pelabuhan Tanjung Emas



### 2.3 Beauty of Asia

Pada tahun 2007, Kota Semarang memiliki sebutan baru yakni *Beauty of Asia* yang diperkenalkan berbarengan dengan program pariwisata Semarang Pesona Asia (SPA). Sebutan ini berdasarkan Kota Semarang memiliki keindahan baik alam maupun budayanya. Keindahan kota tersebut diantaranya dapat digambarkan bagaimana kota bawah dilihat dari kota atas sebagaimana terlihat dalam photo-photo berikut di bawah ini.

Gambar 2.3  
Keindahan Kota Semarang Bawah Dilihat Dari Kota Semarang Atas  
Tugu Tabanas dari atas Gardu Pandang Gombel



Sumber : <https://www.google.co.id/search?q=Kota+Atas+Semarang&espv>

Adapun keindahan gambaran Kota Semarang Bawah di antaranya adalah sebagaimana photo-photo berikut dibawah ini:

Gambar 2.4  
Keindahan Kota Semarang Bawah  
Simpang Lima sebagai pusat bisnis dan wisata



Simpang Lima Ciy Center (SLCC) adalah salah satu *Central Business District (CBD)* atau Kawasan Bisnis Terpadu yang terletak di Semarang Pusat dan salah satu CBD yang berkembang di jantung kota Semarang. Tidak heran apabila banyak bangunan-bangunan jangkung atau biasa disebut pencakar langit hadir dikawasan ini. Beberapa *signature building* yang menjadi ciri khas dari SLCC Semarang adalah Ciputa Swiss-Belhotel International Hotel Semarang, Ciputra Mall, Horison Hotel, Plaza Simpang Lima, Louis Kienne Serviced Apartment Hotel, HA-KA Hotel (coming soon), Santika Premiere Hotel, Wisma HSBC, INDOSAT Ooredoo Tower, Living Plaza ACE Hardware & InForma, Gramedia Center Pandanaran, Accor Ibis Simpang Lima Hotel, Amaris Simpang Lima Hotel, Tentrem Mixed-Use Tower (coming soon),

Simpang Lima Residences, SMC (Semarang Medical Center) Telogorejo Hospital, Pandanaran Hotel, DBS Center, @Hom Hotel, SentraLand Superblock, Graha Bank Indonesia, Plaza Telkom, Wisma Telkomsel, XL Axiata Center Simpang Lima, Bank Mandiri Plaza, CitiBank Square, Pramuka Building ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang)).

Di samping Simpang Lima, pusat Kota Semarang yang juga terkenal adalah dengan Tugu Muda nya, sebagaimana gambar berikut ini.



Keindahan budaya di Kota Semarang yang menarik dan unik adalah hadirnya vihara Sam Poo Kong. Hal ini karena sejarah Indonesia tidak terlepas juga dengan orang-orang China yang berlabuh di Semarang. Salah satu peninggalan China tersebut adalah Vihara Sam Poo Kong sebagaimana gambar berikut di bawah ini.



Tempat ini merupakan petilasan pendaratan laksamana dari negeri Tiongkok yang sangat populer, yaitu Laksamana Cheng Ho, yang kemudian diabadikan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu tempat wisata budaya. Jika kita menapakkan kaki di area ini serasa kita terbang ke negeri Tiongkok.

#### **2.4 Outstadt atau Little Netherland**

Dengan banyaknya bangunan kuno peninggalan jaman Belanda yang bercirikan atau bergaya bangunan khas Belanda maupun Eropa yang masih berdiri kokoh, Kota Semarang mendapat julukan sebagai Belanda kecil atau *Little Netherland (outstadt)* khususnya kawasan Kota Lama. Photo-photo dibawah menggambarkan Kota Semarang sebagai *Little Netherland* sebagaimana dimaksud.

Gambar 2.5 3  
Kota Semarang sebagai *Little Netherland*

Lawang Sewu



Gereja Blendug



Komplek bangunan kuno peninggalan Belanda yang berdiri megah di Kota Lama ini kerap menarik perhatian wisatawan. Kota Lama merupakan pusat pemerintahan di masa penjajahan Belanda oleh karenanya hampir semua bangunan yang berdiri disana menyajikan kemegahan arsitektur Eropa di masa lalu. Saat ini komplek bangunan Kota Lama telah beralih fungsi, namun masih ada satu bangunan yang hingga sekarang fungsinya belum berubah yakni Gereja Blenduk. Dikatakan sebagai Gereja Blenduk karena gereja ini memiliki atap kubah yang berbentuk setengah lingkaran yang mana dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah blenduk. Gereja Blenduk masih aktif digunakan untuk beribadah oleh umat kristiani setiap Hari Minggu. Gereja Blenduk ini merupakan icon Kota Lama (<http://achmadyani-airport.com/detail/wisata/kawasan-little-netherland-kota-semarang>).

## **2.5 Kota ATLAS**

Semarang memiliki semboyan Kota Atlas kepanjangan dari Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat. Sebagai selogan pemelihara keindahan kota yang terkenal pada tahun 1990-an pada era Walikota Sutrisno Suharto. ATLAS sendiri bermakna:

2.5.1 Aman : Bebas dari segala tekanan dan gangguan keamanan dan ketertiban dan ketentraman.

2.5.2 Tertib : Kehidupan yang tertib di segala bidang termasuk lalu lintas.

2.5.3 Lancar : Lancar dalam hal pelayanan kepada publik termasuk dalam hal kelancaran lalu lintas.

2.5.4 Asri : Memiliki pengertian lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman

2.5.5 Sehat : Memiliki pengertian tercapainya kehidupan masyarakat sehat jasmani dan sehat rohani.

## **2.6 Kota Lumpia**

Sebutan ini dilatarbelakangi oleh makanan kecil khas Semarang yang merupakan hasil perpaduan dua alkuturasi antara budaya Tiongkok dengan Jawa yang disebut dengan Lumpia. Makanan ini cukup terkenal di seluruh Indonesia, selain makanan kecil yang lain khas dari Kota Semarang, yaitu wingko babat dan bandeng presto.

## **2.7 Kota Jamu**

Sebutan lain Kota Semarang adalah sebagai Kota Jamu. Sebutan ini diberikan karena di Kota Semarang terdapat perusahaan jamu (tradisional) tertua di Indonesia, yaitu PT Jamu Jago. Perusahaan jamu yang besar dan tua lainnya adalah PT Jamu Nyonya Meneer. Kedua perusahaan jamu ini kemudian diabadikan dengan berdirinya Museum Jamu Jago dan Nyonya Meneer. Adapun perusahaan jamu yang lain yang saat ini sangat terkenal di Indonesia dan bahkan di manca negara adalah Jamu Sido Muncul.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis, terlebih di era otonomi daerah sebagai tuntutan Reformasi Indonesia 1998, Kota Semarang akan terus mengalami perkembangan dalam bidang pembangunan sesuai dengan karakter sebagai ibukota suatu propinsi. Perkembangan pembangunan yang ada

di Kota Semarang tersebut dapat dilihat melalui proporsi tata guna lahan Kota Semarang pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Tata Guna Lahan Kota Semarang Tahun 2012 - 2015**

Pergunaan Lahan	Luas Pergunaan Lahan (Hektar)			
	2012	2013	2014	2015
Sawah	3826.97	3826.97	3789.63	3789.63
Tegalan/ Kebun	7808.19	7808.19	7588.71	7588.71
Ladang/ Huma	753.69	753.69	753.69	753.69
Perkebunan	880.50	880.50	880.50	880.50
Ditanami Pohon	1344.92	1344.92	1344.92	1344.92
Padang Penggembalaan/ Rumput	552.11	552.11	481.64	481.64
Sementara Tidak Diusahakan	129.23	129.23	129.23	129.23
Tambak/ Kolam/ Empang, dll	2341.98	2341.98	4633.84	4633.84
Jalan/ Pemukiman/ Perkantoran/ Sungai, dll	17768.23	17768.23	17768.23	17768.23

*Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26>*

Berdasarkan tabel di atas, Kota Semarang memiliki tata guna lahan terbesar pada sektor jalan, pemukiman, perkantoran, dan sungai. Sektor pengolahan lahan dan sumber daya alam yaitu tegalan, kebun, sawah, tegalan, dan hutan, mencakup lebih dari setengah luas kawasan yang dimiliki Kota Semarang.

Pembangunan di Kota Semarang sendiri telah lama berfokus pada pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan industri, mengingat bidang-bidang tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di Kota Semarang. Di bidang perdagangan sendiri, Kota Semarang memiliki berbagai komoditas yang diekspor seperti hasil-hasil perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, makanan, kerajinan, dan perindustri. Kuantitas komoditas tersebut juga cenderung memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.3****Realisasi Volume Ekspor Non Migas menurut Sektor (dalam Kuintal)**

No	Sektor/Komoditas	2012	2013	2014
1.	Perkebunan	402.824,17	13.278.572	18.092.907
2.	Kehutanan	27.327,28	68.404.573	103.606.580
3.	Pertanian	30.918,57	2.777.458	4.314.521
4.	Perikanan	11.652,45	820.691	450.839
5.	Peternakan	349,51	42.864.797	51.393.812
6.	Rempah-rempah	4.564,01	359	30.440
7.	Makanan	30.984,12	1.575.889	1.270.595
8.	Kerajinan	9.353,78	20.316.069	23.567.630
9.	Perindustrian	3.205.188,77	78.376.186	101.634.427

Sumber: Semarangkota.bps.go.id

Tabel 2.3 tersebut menunjukkan sektor perindustrian sebagai sektor yang paling besar memberikan kontribusi ekspor. Akan tetapi secara keseluruhan, masing-masing sektor cenderung mengalami peningkatan kuantitas ekspor dari tahun ke tahun. Untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya pengelolaan tenaga kerja yang baik sebagai salah satu unsur yang berperan dalam meningkatkan produktivitas dalam kegiatan produksi.

**Tabel 2.4****Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Semarang**

Tahun	Angkatan Kerja		Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Pekerja
	Laki-Laki	Perempuan		
2012	397.074	242.141	639.215	639.215
2013	501.705	372.827	874.532	774.140

Sumber: Diolah dari Semarangkota.bps.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja dan jumlah pekerja di Semarang seimbang. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2012 seluruh angkatan kerja dapat terserap dengan baik. Di tahun 2013 terjadi selisih antara jumlah angkatan kerja dan jumlah pekerja sebesar 100.392, dalam artian bahwa 100.392 orang dalam angkatan kerja di tahun tersebut belum mendapat pekerjaan.

Selain memiliki berbagai komoditas yang bernilai ekspor dan jumlah angkatan kerja yang relatif tinggi, Kota Semarang juga memiliki berbagai bangunan yang

bernilai historis. Bangunan-bangunan bernilai historis tersebut memiliki beragam latar budaya dan religius. Keberagaman tersebut berkembang dengan selaras di Kota Semarang sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Bangunan-bangunan tersebut antara lain adalah Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Kauman, Masjid Menara (Masjid Layur), Gereja Blenduk (Gereja Immanuel), Kelenteng Gedung Batu (Sam Poo Kong), Pagoda Avalokitesvara, Goa Kreo, Taman Lele, Simpang Lima, *Chinese Town* (Pecinan), Kebun Binatang Wonosari, dan Kota Lama. Selain itu berbagai kesenian dan festival seperti *dhugdheran* yang diselenggarakan setiap Bulan Ramadan dan *Semarang Night Carnival* sebagai rangkaian perayaan HUT Kota Semarang.

**Tabel 2.5**  
**Data Jumlah Wisatawan Kota Semarang**

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan
1.	2010	1.915.892 orang
2.	2011	2.100.926 orang
3.	2012	2.712.442 orang
4.	2013	3.157.658 orang

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2013 melalui LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2013*

Keberagaman objek wisata di Kota Semarang memberikan pengaruh positif bagi kedatangan jumlah wisatawan ke Kota Semarang. Berdasarkan data pada Tabel 2.5, jumlah wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2012 yakni sebanyak 611.516 wisatawan dibanding jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata.

**Tabel 2.6**  
**Pendapatan Daerah Kota Semarang Sektor Pariwisata**

No.	Tahun	Besaran Pendapatan
1.	2010	Rp65.767.643.499,00
2.	2011	Rp78.344.794.420,00
3.	2012	Rp87.978.572.590,00
4.	2013	Rp107.163.316.629,00

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2013 melalui LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2013*

Data di atas menunjukkan pendapatan daerah Kota Semarang dari sektor pariwisata. Pendapatan daerah dari sektor ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan di Kota Semarang.

Sebagai kota yang masih terus mengalami perubahan dan perkembangan, Kota Semarang sendiri tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dalam upaya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Setiadi dan Ma'arif (2009) melakukan penelitiannya mengenai hal tersebut dan didapatkan hasil berupa pemetaan isu permasalahan utama di Kota Semarang sebagai berikut.

**Tabel 2.7**  
**Pemetaan Isu Utama di Setiap Urusan Pemerintahan Kota Semarang**

No	Ruang Lingkup	Isu Utama
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan</li> <li>• Rendahnya mutu pendidikan di Kota Semarang</li> </ul>
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jumlah penderita gizi buruk</li> <li>• Tingginya angka kematian ibu melahirkan</li> <li>• Kurangnya cakupan air bersih pada daerah rawan kekeringan</li> <li>• Penurunan cakupan imunisasi BCG</li> </ul>
3.	Bina Marga & Pengairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerusakan jalan yang disebabkan oleh genangan rob dan banjir</li> </ul>
4.	Cipta Karya/Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan fasilitas perumahan masih terbatas</li> </ul>
5.	Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luasan ruang terbuka hijau belum mencapai target sesuai dengan Rencana Tata Ruang</li> <li>• Inkonsistensi Rencana Tata Ruang</li> <li>• Belum ada penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang</li> </ul>
6.	Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkonsistensi antara program SKPD terhadap RPJM dan RKPD</li> </ul>
7.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan pengguna angkutan umum dan peningkatan jumlah kendaraan pribadi</li> </ul>
8.	Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya penambangan galian C yang tidak berijin dan lemahnya penegakan hukum terhadap penambang galian C ilegal</li> <li>• Surat Izin Pengeboran ABT tidak berperan maksimal sebagai alat pengendali</li> </ul>
9.	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konversi lahan pertanian dan hijau menjadi</li> </ul>

		perumahan di Semarang Atas
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan pinggiran kota</li> <li>• Buruknya kualitas pelayanan administrasi kependudukan</li> </ul>
11.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak</li> </ul>
12.	Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya pendapatan rumah tangga per bulan</li> </ul>
13.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan angka kemiskinan</li> <li>• Tingginya angka pengangguran</li> </ul>
14.	Tenaga Kerja & Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semakin sedikitnya jumlah penduduk yang bekerja</li> <li>• Tingginya angka beban ketergantungan</li> </ul>
15.	Koperasi & UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya produktivitas SDM dalam UMKM</li> </ul>
16.	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lamanya prosedur perijinan investasi</li> <li>• Kurangnya minat investasi, baik PMDN dan PMA</li> </ul>
17.	Kebudayaan & Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya aset bangunan tua bersejarah yang tidak terawat</li> <li>• Kurangnya event-event kesenian dan budaya tradisional</li> </ul>
18.	Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada</li> <li>• Rendahnya partisipasi perempuan dalam pilkada</li> </ul>
19.	Pengelolaan Keuangan, Aset, Pengawasan, & Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD Semarang</li> <li>• Rendahnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan satu atap atau one stop service (OSS)</li> </ul>
20.	Komunikasi & Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatasnya dan mahalnya penggunaan jaringan seluler sebagai media informasi</li> <li>• Rendahnya oplah media cetak</li> </ul>
21.	Pertanian & Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya laju konversi lahan pertanian</li> </ul>
22.	Kelautan & Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluktuasi produksi perikanan darat</li> <li>• Penurunan produksi ikan laut</li> <li>• Konsumsi ikan yang masih rendah</li> </ul>
23.	Perkebunan & Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penebangan pohon yang tidak terkendali di Semarang Atas</li> </ul>

Sumber: Setiadi & Mu'arif, 2009

### **BAB III**

## **PARADIPLOMASI DALAM MEMPERKUAT LOKALITAS KOTA SEMARANG**

Dalam posisinya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki fungsi sebagai *hub* atau pusat dari aktifitas strategis yang terjadi di wilayahnya. Dalam rangka memenuhi fungsi tersebut, Pemerintah Kota Semarang terfasilitasi oleh kerangka institusi berupa kebijakan desentralisasi yang dijalankan di tengah arus demokratisasi sebagai pemenuhan Pemerintah Pusat atas prinsip akuntabilitas dan bagi daerah. Selanjutnya melalui kerangka tersebut, Pemerinta Kota Semarang, beserta pemerintah kabupaten sekitar yang tergabung dalam *hinterland*-nya, memanfaatkan peluang yang ditawarkan globalisasi dengan menjadi aktor paradiplomasi, yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis pada pengembangan potensi lokal.

### **3.1 Lokalitas Kota Semarang sebagai Modalitas Paradiplomasi di Level Global**

Konsep lokalitas lekat kaitannya dengan tempat atau wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa lokalitas perlu memiliki unsur atau komponen yang dapat diidentifikasi. Dalam konteks ini, lokalitas Kota Semarang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur pembentuk karakter sebagai identifikasi yang membedakannya dengan wilayah lain, yang merupakan interaksi dinamis antara unsur statis berupa geografis setempat, yang kemudian memberikan pengaruh pada unsur-unsur dinamisnya seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Kota Semarang yang secara geografis terletak di pesisir utara Pulau Jawa merupakan pintu perdagangan sehingga secara historis memiliki posisi penting dalam perkembangan budaya lokal. Interaksi antara kelompok pendatang dan penduduk asli menjadikan Kota Semarang sebagai *melting pot* budaya Jawa, Arab, Cina, dan Belanda. Jejak akulturasi dan asimilasi budaya tersebut masih dapat ditemukan di Kota Semarang, misalnya dalam bentuk arsitektur, seni batik, hingga kuliner.

Eksistensi kelompok diaspora yang berbaur dengan penduduk asli juga menjadi bukti posisi Kota Semarang sebagai *melting pot* dari berbagai budaya semenjak berdiri

500 tahun yang lalu hingga di era globalisasi masa kini. Komunitas diaspora di wilayah Kota Semarang didominasi oleh mereka yang disebut sebagai “peranakan” (keturunan etnis Cina) menjadi refleksi nyata dari interaksi multi etnis yang telah berjalan sepanjang sejarah perkembangan kota.

Akulturasinya antara budaya Cina dan Jawa menjadi pengaruh dominan dalam pembentukan karakter budaya Semarang, yang terefleksikan dalam budaya kuliner seperti loempia (lumpia), kue moci, wingko babad, hingga lontong cap go meh. Dalam kesenian daerah, akulturasi antara budaya Jawa dan Cina (juga budaya Arab) juga dapat dilihat dari pertunjukan seni “Warak Ngendhog” yang merupakan makhluk fiktif berupa binatang berkepala singa (sebagai representasi etnis Cina), berleher panjang (Arab), serta bertubuh kambing (Jawa) yang diarak mengelilingi kota menjelang bulan Ramadhan. Dalam bidang arsitektur, komunitas peranakan yang mulanya bermukim di daerah Simongan, pada tahun 1741 direlokasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Gang Baru yang sekarang berada di kawasan Kota Lama (Pikiran Rakyat, 2016). Dari perpindahan permukiman tersebut, terdapat peninggalan arsitektur berupa Kuil Sam Poo Kong serta arsitektur bangunan bergaya Oriental di kawasan Gang Baru yang kini juga dikenal dengan nama Kampung Pecinan. Aktifitas di kawasan Pecinan ini masih mempertahankan nilai-nilai budaya Peranakan, sehingga menjadi atraksi wisata tersendiri bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman belanja dan kuliner tradisional Cina.

Selain Etnis Cina, Kota Semarang sebagai *melting pot* juga mempertemukan budaya Barat yang dibawa oleh pendudukan kolonial Belanda dengan budaya lokal. Meskipun demikian, jejak interaksi antar kedua budaya tersebut lebih bersifat asimilasi dibandingkan akulturasi. Hal ini dapat ditelusuri jejaknya dari segregasi antar ras yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial antara bangsa kulit putih, pribumi, dan bangsa lainnya (termasuk di dalamnya Etnis Cina dan Arab), yang diciptakan dalam stratifikasi sosial masyarakat untuk membatasi interaksi antar kelompok. Pembatasan itu sendiri dimaksudkan untuk menjaga kemurnian budaya kolonial yang pada masa itu berfungsi sebagai instrumen hegemoni. Fungsi yang demikian dapat dilihat dari digunakannya gaya-gaya arsitektur Belanda dalam bangunan-bangunan simbol kekuasaan mulai dari rumah pejabat kolonial, gedung pemerintahan hingga gereja. Tidak adanya pembauran budaya di level akar rumput menjadikan kedua budaya tidak

mengalami akulturasi, sehingga ketika pendudukan kolonial berakhir, tidak ada nilai-nilai budaya Barat yang tertinggal dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang.

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa asimilasi dan akulturasi yang hanya mungkin terjadi karena faktor geografis tersebut telah membentuk ciri budaya lokal yang membedakannya, termasuk dengan wilayah sekitar yang nantinya dikenal sebagai *hinterland* Kota Semarang. Proses budaya yang terjadi telah mempengaruhi *tangible* maupun *intangible culture* yang berkembang, yang nantinya mampu menjadi salah satu modalitas sosial-budaya dalam paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain dalam konteks mempromosikan Kota Semarang di level global. Modalitas sosial-budaya yang merupakan nilai-nilai budaya ini nantinya mampu menjadi kemasan romantisme atas modalitas ekonomi, yang merefleksikan nilai-nilai komersial.

Seperti unsur sosial-budaya yang dipengaruhi perkembangannya oleh kondisi geografis, modalitas ekonomi lokal Kota Semarang juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, tidak hanya terkait tipologi yang mempengaruhi tipe aktifitas ekonomi yang dapat dijalankan, tetapi juga persebaran demografi yang nantinya mendorong perubahan strategi pengembangan kota dengan mengintegrasikan wilayah-wilayah sekitarnya yang termasuk dalam *hinterland* Kota Semarang.

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, Kota Semarang yang dihuni oleh 1,6 juta penduduk (Pemerintah Kota Semarang, n.d.) memberikan prioritas sebesar 17.768,23 km<sup>2</sup> untuk fasilitas jalan, pemukiman, perkatoran, serta daerah aliran sungai. Penggunaan lahan terbesar kedua adalah tegalan/kebun dengan luas hanya mencapai 7.588,71 km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2016), yang mengindikasikan kegiatan masyarakat yang berbasis agraris masih banyak yang menggantungkan hidupnya di bidang tersebut meskipun lama-kelamaan tergerus oleh keperluan penyediaan lahan tinggal bagi penduduk serta fasilitas penunjang pemukiman.

Pembangunan di Kota Semarang yang lebih banyak difokuskan pada pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan industri merupakan pilihan yang logis jika ditimbang dari aspek historis serta karakter geografis. Dari aspek historis, sebagai kota yang tumbuh dan berkembang sebagai kota pelabuhan sejak era kerajaan Hindu-Buddha dan semakin ditegaskan fungsinya di era pendudukan Pemerintah Kolonial Belanda, Kota Semarang lebih banyak mengembangkan infrastruktur penunjang

aktifitas ekonomi berbasis jasa dengan rancangan tata ruang kota yang juga dibuat berdasarkan tujuan tersebut. Dengan jadi pusat perdagangan dan pemerintahan bagi wilayah Jawa Tengah, Kota Semarang hanya memiliki jumlah lahan yang terbatas di daerah rural untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian guna menunjang kehidupan di wilayah kota. Dalam perkembangannya, fungsi penunjang yang dimiliki oleh wilayah rural tersebut didorong lebih jauh beberapa wilayah sekitar seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Grobogan (Kedungsepur) sebagai *hinterland* dari Kota Semarang (Pemerintah Kota Semarang, 2014, 2), sementara wilayahnya sendiri lebih banyak yang difungsikan sebagai pusat administrasi dan bisnis.

Dengan labelnya sebagai kota investasi dan perdagangan, lahan yang ada di Kota Semarang lebih banyak diperuntukkan sebagai kawasan industri seperti Taman Industri BSB, Kawasan Industri Candi, BSB Bonded Zone, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma (Seputar Semarang, n.d.), Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru. Tingginya arus investasi yang masuk ke Kota Semarang dalam dekade terakhir membuat kawasan industri dengan luas total 1.029 ha ini sudah penuh (Lazuardi, 2014) sehingga dalam pembuatan kebijakan pembangunan, Pemerintah Kota mulai mendorong pembangunan kawasan industri di wilayah *hinterland* sekitarnya.

Banyaknya kawasan industri yang telah berkembang di Kota Semarang ini kemudian menjadi modalitas tersendiri karena telah tersedianya suprastruktur dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi yang meliputi investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang memadai. Terintegrasinya aktifitas ekonomi dari hulu ke hilir ini selanjutnya menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan paradiplomasinya, yang kemudian dikemas dalam paket kebijakan pembangunan berbasis *Meetings, Incentives, Conferences, and Events* (MICE) yang dikemas dengan romantisme budaya yang dimiliki sebagai bentuk modalitas sosial-budaya Kota Semarang.



### **3.2 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Lokalitas dalam *Meetings, Incentives, Conferences, and Events (MICE)***

MICE, atau juga dikenal sebagai *business event*, merupakan salah satu jenis pariwisata yang memadukan antara keperluan bisnis dan wisata untuk kesenangan. Secara keseluruhan, MICE dapat memberikan keuntungan yang lebih besar daripada wisata untuk kesenangan. Pertama, pengeluaran rata-rata per orang untuk aktifitas MICE lebih tinggi daripada pengeluaran wisata untuk kesenangan. Kedua, sebagian besar pengeluaran tersebut lebih banyak terserap untuk biaya komoditas pertemuan seperti sewa tempat dan biaya organisasi, yang berarti bahwa kemungkinan memperoleh keuntungan dari *added value* lebih tinggi daripada jika sebagian besar hanya digunakan untuk transportasi dan makanan. Ketiga, industri wisata berbasis MICE tidak mengenal musim sehingga keuntungan dapat dioptimalkan sepanjang tahun (Thailand Convention and Exhibition Bureau, 2015).

MICE sendiri menjadi pilihan yang rasional bagi Kota Semarang setidaknya karena dua faktor. Pertama, kehidupan ekonomi Kota Semarang lebih banyak didominasi oleh aktifitas bisnis perdagangan. Kota Semarang memiliki delapan kawasan industri aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Banyaknya perusahaan di Semarang tentunya juga berimplikasi pada kuantitas acara bisnis yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kedua, pusat atraksi dari aktifitas MICE adalah acara bisnis yang diselenggarakan, dengan wisata kesenangan sebagai nilai tambah dari paket yang ditawarkan. Dengan fokus yang lebih banyak tertuju pada keikutsertaan di dalam acara bisnis, dapat mengkompensasi minimnya destinasi pariwisata unggulan yang belum dikelola dengan baik. Sementara menjual keunggulan komparatif di sisi pelayanan penyelenggaraan acara bisnis, pemasukan yang diperoleh serta investasi yang masuk dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi objek-objek wisata unggulan Kota Semarang.

Sebagai bentuk realisasi dari arah kebijakan ini, pada tahun 2007 pemerintah Kota Semarang di bawah Walikota Sukawi Sutarip mencanangkan program “Semarang Pesona Asia (SPA)” yang bertujuan untuk memperkenalkan dan membangun citra kota baik di level nasional maupun internasional guna mendorong pembangunan ekonomi dan pariwisata lokal. Program ini memiliki tiga kegiatan

pokok, yaitu kepariwisataan, forum bisnis pengusaha, serta festival atau pameran. (Kementerian Sekretariat Negara, 2007).

Kegiatan kepariwisataan dilakukan dengan melakukan revitalisasi terhadap objek-objek wisata yang mengangkat budaya lokal, misalnya seperti Kelenteng Sam Poo Kong, Kawasan Gang Baru, Kawasan Kota Lama, Gedung Lawang Sewu, hingga Masjid Agung Jawa Tengah. Selain revitalisasi, pemerintah juga berupaya menghidupkan kesenian lokal melalui festival yang diadakan, dua di antaranya adalah festival Masjid Agung Jawa Tengah dan festival Sam Poo Kong (Kementerian Sekretariat Negara, 2007). Dengan menggerakkan kehidupan ekonomi-pariwisata lokal, selanjutnya pemerintah menegaskan misi dibentuknya program SPA dengan diadakannya forum bisnis pengusaha yang bertujuan untuk mempromosikan Kota Semarang (dan sekitarnya) kepada investor melalui acara tahunan yang dinamakan sebagai Semarang Business Forum (Sem'Biz).

Setelah terjadi pergantian rezim kepemimpinan, kegiatan dari program SPA yang masih dipertahankan adalah Sem'Biz. Acara tahunan yang kini berada di bawah koordinasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang ini memiliki tujuan khusus guna mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing Kota Semarang demi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, Sem'Biz tidak hanya menjadi forum promosi investasi di Kota Semarang saja tetapi juga mengajak kawasan *hinterland* yang dikenal dengan sebutan Kedungsepur (Pemerintah Kota Semarang, 2014).

Inklusi wilayah Kedungsepur dalam forum Sem'Biz dilatarbelakangi setidaknya oleh dua alasan. Pertama, wilayah *hub* tidak akan berkembang tanpa ada wilayah yang menjadi *spoke*, demikian juga sebaliknya. Pemahaman akan posisi strategis Kota Semarang sebagai pengungkit investasi di region terefleksikan dalam visi Sem'Biz, yaitu menjadikan kota tersebut sebagai *trendmark investment policy* di Jawa Tengah (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Kedua, daya tarik bagi investor untuk bergabung dalam forum ini juga akan lebih tinggi jika yang ditawarkan tidak hanya kesempatan berinvestasi di Kota Semarang saja, melainkan kawasan *Greater Semarang* yang telah terintegrasi dengan baik, minimal dari sisi infrastruktur penunjang industri.

Selanjutnya, forum Sem'Biz yang mempertemukan *stakeholders* bisnis dan investasi mulai dari unsur pemerintah kota/kabupaten, instansi penanaman modal kabupaten/kota, pelaku usaha (investor), asosiasi pengusaha/profesi, lembaga keuangan, BUMN dan BUMD menghasilkan LoI sebagai bukti komitmen para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang dan sekitarnya (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Luaran forum dalam bentuk LoI tersebut yang kemudian menjadi parameter untuk melihat keefektifan Sem'Biz dalam mempromosikan perekonomian *Greater Semarang* yang berbasis potensi lokal.

Dikaitkan dengan potensi lokal sebagai daya tarik investasi dalam Sem'Biz, sebagaimana disampaikan oleh Sita Dewi Pardhihastiwi, koordinator pelaksana Sem'Biz di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu<sup>2</sup>, Kota Semarang secara aktif mempromosikan potensi investasi properti terutama untuk revitalisasi kawasan Kota Lama. Penawaran tersebut dilakukan karena banyak potensi properti yang terbengkalai sementara pemerintah kota tidak memiliki cukup anggaran untuk mengelolanya. Hal ini senada dengan temuan Setiadi dan Ma'arif (2009) mengenai isu utama Kota Semarang yang salah satunya adalah banyaknya aset bangunan tua bersejarah yang tidak terawat.

Padahal di sisi lain, revitalisasi bangunan di kawasan Kota Lama merupakan salah satu program yang harus diselesaikan jika pemerintah Kota Semarang memang berkomitmen membangun citra sebagai kota MICE. Kawasan Kota Lama dapat menjadi destinasi wisata pelengkap *business event* yang berlangsung, di mana nilai jualnya yang paling tinggi adalah kemasannya romantisme historis yang merupakan salah satu modal sosial-kultural utama yang dimiliki oleh Kota Semarang. Meskipun demikian, Sita menyatakan bahwa nyatanya sulit untuk menarik minat investor untuk memasuki sektor ini karena rumitnya prosedur perizinan yang harus dimiliki sebelum investasi bisa ditanamkan.

Terlepas dari kesulitan yang dialami oleh pemerintah Kota Semarang dalam membangun destinasi wisata historis, Sem'Biz dapat dikatakan berhasil mendatangkan investasi dalam kerangka pembangunan industri MICE. Selain sektor properti historis, Pemerintah Kota Semarang secara agresif membuka peluang investasi properti dalam bentuk hotel, hunian, maupun kawasan perkantoran terpadu. Sebagai contoh, dalam

---

<sup>2</sup> Wawancara dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang pada hari Rabu, 26 Oktober 2016.

Sem’Biz tahun 2014, investasi yang terkumpul untuk bidang properti tersebut nilainya mencapai Rp 2,93 triliun, lebih dari setengah dari total investasi yang diterima Kota Semarang yaitu sebesar Rp 4,907 triliun (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Dari sisi ini, dapat dilihat bahwa Sem’Biz sebagai salah satu forum bisnis investasi tidak lepas dari ide besar arah pengembangan perekonomian Kota Semarang, yaitu sebagai pusat industri, perdagangan, dan MICE yang unggul di level nasional maupun internasional.

### **3.3 Prototipe Paradiplomasi Kota Semarang**

Globalisasi yang membawa tantangan baru atas munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional mendorong desentralisasi dalam praktek diplomasi. Konsepsi diplomasi dalam konteks tradisional yang dibangun atas paradigma hubungan antar negara dengan legitimasi kekuasaan berada di tangan pemerintahan pusat mulai diperdebatkan lagi dengan munculnya aktor-aktor baru mulai dari perusahaan multinasional (MNCs), organisasi non-pemerintah (NGOs), kelompok epistemik, hingga individu yang dengan adanya globalisasi memiliki kapabilitas politik maupun ekonomi yang dapat mempengaruhi konstelasi politik maupun hubungan internasional. Perdebatan atas munculnya aktor baru dalam hubungan internasional sendiri telah muncul di era 1970-an melalui “*Transnational Relations and World Politics*” yang ditulis oleh Robert Keohane dan Joseph Nye yang mencoba memprediksi peran perusahaan multinasional dalam konteks hubungan transnasional.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, tren demokratisasi yang membawa ide tentang desentralisasi mendorong peran yang semakin besar dari provinsi, sebagai unit pemerintahan di bawah negara. Dikaitkan dengan konsepsi diplomasi sebagai cara mencapai kepentingan (nasional), meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan lokal juga berimplikasi pada konsepsi dan praktik diplomasi tradisional. Dengan adanya independensi terikat serta legitimasi yang dimiliki, selanjutnya pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan globalisasi melalui kerja sama dengan aktor-aktor global dalam kerangka hubungan transnasional.

Fenomena yang oleh Rodrigo Tavares (2016) disebut sebagai “desentralisasi kerjasama (internasional)” ini memunculkan kemungkinan akan terjadinya diplomasi

---

<sup>3</sup> Lihat Keohane R. dan Nye J. *Transnational Relations and World Politics* (Cambridge: Harvard University Press, 1973).

yang dilakukan juga oleh aktor-aktor di bawah negara, termasuk di antaranya adalah pemerintah daerah. Meskipun terdapat keleluasaan yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan daerah, UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 1 menjadi batasan independensi pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi kerjasama di level global, karena kekuasaan dalam politik luar negeri masih menjadi otoritas absolut pemerintah pusat (Fathun, 2016, 80).

Meskipun demikian, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Tata Cara Hubungan Luar Negeri, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menlu RI No. 09/A/KP/XII/2006, Permendag No. 3 Tahun 2008, Permendag No. 74 Tahun 2012 dapat menjadi landasan legal dan teknis pemerintah daerah dalam menjalin hubungan transnasional dengan aktor-aktor global lainnya. Berdasarkan wewenang terbatas yang dimiliki, pemerintah daerah dapat membuat dokumen legal yang berfungsi sebagai landasan kerjasama global dalam bentuk *Memorandum of Understanding* atau *Letter of Intent* (LoI) (Fathun, 2016, 81). Diaturnya kemungkinan penggunaan dua instrumen tersebut dalam konteks hubungan transnasional yang dijalin oleh pemerintah sub-nasional dapat dilihat sebagai bentuk akomodasi dan solusi negara terhadap dinamika yang terjadi, yang mana sering kali tidak dapat direspon secara efektif dan efisien oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, berbagai istilah dimunculkan sebagai upaya konseptualisasi fenomena kontemporer berupa hubungan yang dijalin oleh aktor-aktor sub-negara di level global, sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu serta poin yang ingin ditekankan. Dengan kata lain, “subnational foreign affairs”, “subnational foreign policy”, “sub-state diplomacy”, “multi-layered diplomacy”, “constituent diplomacy”, “local diplomacy”, “local foreign policy”, “regional diplomacy”, “plurinational diplomacy”, “post-diplomacy”, “micro diplomacy”, “foreign policy localization”, “catalytic diplomacy”, hingga “paradiplomacy” (Tavares, 2016; Kuznetsov, 2015) yang ditemukan dalam kajian literatur secara pragmatis dapat dikatakan merujuk pada fenomena yang sama. Selanjutnya dalam pembahasan ini, istilah diplomasi lokal akan digunakan secara bergantian dengan paradiplomasi. Sementara diplomasi lokal lebih

menekankan pada aktor yang melakukan diplomasi, paradiplomasi lebih menitikberatkan fokus pada relasi paralelnya<sup>4</sup> dengan diplomasi konvensional.

Dengan mengambil fokus kepada relasi, selanjutnya tulisan ini menggunakan definisi yang disampaikan oleh A. Kuznetsov (2015), yang menyatakan bahwa paradiplomasi adalah “*a form of political communication for reaching economic, cultural, political, or any other types of benefits, the core of which consists in self-sustained actions of regional governments with foreign governmental and non-governmental actors*”. Dalam definisi tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat tujuan dari dilakukannya paradiplomasi, yaitu perolehan ekonomi, politik, atau keuntungan yang lainnya. Hal ini berkorelasi dengan *layers of paradiplomacy* yang ditawarkan oleh André Lecours (2008).

Lapisan pertama berkaitan dengan isu ekonomi, di mana pemerintah sub-negara bertujuan untuk membangun eksistensi internasional dalam rangka menarik investasi dan perusahaan asing serta membuka pasar ekspor yang baru. Tidak ada tujuan yang lain dari paradiplomasi lapis pertama ini selain fungsi kompetisi ekonomi global. Lapisan kedua dari paradiplomasi merupakan aktifitas komunikasi yang lebih intens dari lapis pertama, di mana interaksi yang terjalin tidak lagi hanya sebatas fungsi ekonomi tetapi juga telah merambah ke kerjasama untuk peningkatan hubungan *people to people* di level akar rumput dalam bidang budaya, pendidikan, teknologi, dll. Lapisan ketiga dari paradiplomasi memiliki tujuan politik dengan mengadvokasi identitas lokal di level internasional, yang mungkin berbeda dengan persepsi hasil konstruksi pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pemerintah sub-negara mencoba membangun hubungan internasional yang dapat mendukung perbedaan budaya, otonomi politik, serta karakter dari komunitas yang diwakilinya (Lecours, 2008, 2-4).

Dari ketiga lapis tersebut, dapat ditarik satu benang merah bahwa apapun yang menjadi dasar dan bagaimanapun pola paradiplomasi, tujuan utamanya adalah menarik perhatian masyarakat global terhadap keunikan region sehingga layak untuk dimasukkan dalam peta global. Dalam konteks ini, paradiplomasi berupaya mengubah *terra incognita* menjadi tempat yang menarik dengan potensi maupun permasalahan yang dimilikinya (Sergunin & Joenniemi, 2014, 1). Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa meningkatnya paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-

---

<sup>4</sup> Istilah “paradiplomasi” sendiri muncul pertama kalinya pada tahun 1980-an dalam tulisan Ivo Duchaeck dan Panayotis Soldatos yang menggabungkan kata “parallel” dan “diplomacy”. (Tavares, 2016, 7)

negara yang difasilitasi oleh kemajuan pesat di bidang teknologi komunikasi dan transportasi juga memunculkan permasalahannya tersendiri.

Semakin banyak pemerintah sub-negara yang memotong jalur diplomasi tradisional dapat menimbulkan permasalahan vertikal maupun horizontal. Salah satu permasalahan dengan dimensi horizontal adalah timbulnya *noise* dalam arena diplomasi global, di mana semakin banyak aktor yang masuk dengan segala macam proposal, semakin banyak informasi yang beredar sehingga sulit untuk fokus dalam memilih region mana yang benar-benar prospektif dalam mewujudkan tujuan awal dilakukannya paradiplomasi. Di sisi lain, pemerintah sub-negara perlu efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas sehingga perencanaan strategis harus dilakukan jika tidak mau paradiplomasi yang dilakukan hanya berhenti di tahap seremonial. Oleh karena itu, pemerintah sub-negara selain perlu menyiapkan proposal kerja sama yang memahami dan menonjolkan keunikan potensi lokal, juga perlu berpikir strategis dalam mencari partner.

Menyadari pentingnya paradiplomasi bagi kemajuan daerah di era globalisasi, pemerintah Kota Semarang tidak dapat memungkiri urgensi memperkuat modalitas-modalitas lokal sebagai modal utama dalam mempromosikan wilayahnya di arena global. Kesadaran akan peluang akses komunikasi yang dibuka melalui arus globalisasi dan pemahaman akan potensi lokal Kota Semarang yang berdiri dan berkembang sebagai pusat bisnis perdagangan mendorong munculnya skema kebijakan publik yang berbasis pada MICE, dengan Sem'Biz sebagai salah satu program pendukungnya.

Meskipun belum sepenuhnya menyasar partner-partner global, Sem'Biz telah memiliki kerangka yang mencukupi untuk dijadikan metode paradiplomasi bagi pemerintah Kota Semarang (dan sekitarnya). Sebagaimana tujuan besar dari paradiplomasi itu sendiri, yaitu membuat *terra incognita* agar masuk dalam radar global, Sem'Biz telah menjadi prototipe bagi metode yang efektif karena mampu menempatkan serta mengokohkan posisi Kota Semarang dan *Greater Semarang* dalam peta bisnis nasional. Nilai investasi yang masuk dari investor-investor nasional dan pergerakan ekonomi yang mengikutinya menjadi bukti nyata atas keefektifan komunikasi yang dilakukan antar *stakeholders*. Dalam forum tersebut juga, masing-

masing pemerintah kota/kabupaten telah mampu mengidentifikasi potensi lokal yang layak ditawarkan kepada kalangan investor.

Dengan menggunakan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Tata Cara Hubungan Luar Negeri, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menlu RI No. 09/A/KP/XII/2006, Permendag No. 3 Tahun 2008, serta Permendag No. 74 Tahun 2012, Pemerintah Kota Semarang dapat membuat MoU atau LoI untuk menangkap akses dan peluang yang ditawarkan globalisasi dalam kerangka paradiplomasi. Praktik tersebut nyatanya sudah dilakukan dalam Sem'Biz dengan menerbitkan LoI atas perjanjian investasi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Dari LoI yang disepakati, Kota Semarang memperoleh keuntungan ekonomi berupa arus modal yang masuk guna membangun perekonomian lokal. Dari pergerakan aktifitas ekonomi tersebut, selanjutnya pemerintah dapat memenuhi kewajibannya mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan yang layak, perbaikan fasilitas perkotaan, hingga peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sebagai dampak dari peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam konteks ini, Sem'Biz sebagai prototipe paradiplomasi Kota Semarang telah menunjukkan bahwa desentralisasi kerjasama (nantinya diharapkan menjadi kerjasama internasional) mampu melengkapi diplomasi pemerintah pusat dalam mempromosikan potensi lokal untuk kegiatan bisnis dan investasi bagi para investor asing. Keterbatasan pemahaman diplomat Republik Indonesia akan informasi potensi lokal yang komprehensif dan terbaru dari masing-masing wilayah telah dijawab dengan munculnya aktor-aktor sub-negara baik dari provinsi, kawasan terikat, hingga kota/kabupaten dalam ranah diplomasi global. Kemunculan aktor-aktor ini tidak saja menawarkan ketersediaan informasi potensi lokal yang memadai, tetapi juga mampu memberikan pemahaman akan permasalahan yang sebenarnya terjadi di daerah, sebagai jawaban akan pendekatan Jakarta-sentris yang seringkali bias dalam memandang permasalahan daerah.

Dengan kata lain, prototipe paradiplomasi melalui Sem'Biz merupakan apa yang disebut Lecours sebagai paradiplomasi lapis pertama yang berfokus pada utilitas dalam kompetisi ekonomi. Dikaitkan dengan visi Sem'Biz yang berupaya menjadikan Kota Semarang sebagai *trendmark investment policy* di Jawa Tengah, maka aktifitas diplomasi yang nantinya berlangsung hanya akan menyasar keterpenuhan kepentingan



ekonomi daerah dalam bentuk investasi guna menyelesaikan permasalahan berupa keterbatasan kemampuan akumulasi kapital di level region bahkan nasional. Akumulasi kapital ini menjadi penting untuk disolusikan karena kunci dari pengembangan potensi lokal adalah dengan memiliki ketercukupan modal finansial. Diharapkan dengan memiliki kecukupan modal dalam pembangunan, Kota Semarang tidak akan jauh tertinggal dengan ibu kota provinsi lain di Pulau Jawa sehingga sebenar-benarnya dapat merealisasikan slogan “Semarang Setara”.

Permasalahan seperti dalam kasus pengelolaan aset-aset properti bernilai historis di Kota Semarang menjadi salah satu contoh signifikansi (para) diplomasi yang baik dengan partner-partner global. Dalam kasus ini, terdapat nilai-nilai sosial-budaya lokal yang dapat diadvokasi guna menumbuhkan sentimen, misalnya dengan menggunakan justifikasi konservasi cagar budaya atau arsitektur bersejarah. Dua justifikasi tersebut masih sulit untuk diadvokasi di level nasional, oleh karena itu globalisasi yang menawarkan akses komunikasi langsung dengan aktor-aktor global merupakan alternatif yang paling memungkinkan untuk menjadi solusi dalam kasus ini.

Dari paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang telah memiliki modal dalam membangun paradiplomasi. Dua modal yang paling utama adalah sosial-budaya berupa identitas kultural sebagai kota *melting pot* yang mengalami akulturasi dan asimilasi dengan budaya pendatang. Di satu sisi, modal ini sendiri saja sudah dapat menjadi atraksi untuk pengembangan industri pariwisata berorientasi MICE yang memang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Di sisi lain, nilai-nilai historis dan budaya yang terendogensiasi dalam *tangible* maupun *intangible culture* mampu menjadi romantisme yang mampu menumbuhkan sentimen dari aktor-aktor partner paradiplomasi karena adanya ikatan kultur dalam konteks diaspora maupun keselarasan pemahaman akan nilai-nilai universal yang perlu dipertahankan.

Unsur kedua berupa modalitas ekonomi berkenaan dengan potensi-potensi lokal baik berupa sumber daya alam maupun non-sumber daya alam yang bernilai ekonomis sebagai bagian dari *trade-off* negosiasi paradiplomasi yang dilakukan. Di satu sisi, pemerintah Kota Semarang dan sekitarnya membutuhkan investasi yang nyatanya hanya dapat diperoleh dari luar wilayah mereka. Dengan adanya globalisasi

yang membuka peluang terjalinnya kontak langsung dengan aktor-aktor negara maupun sub-negara di belahan dunia lain dapat menjadi alternatif sumber investasi, bahkan dengan kekuatan kapital yang lebih besar daripada hanya mengandalkan akumulasi kapital dalam negeri. Di sisi yang lain, *partner* potensial ini harus mendapat jaminan bahwa potensi lokal yang ditawarkan juga memiliki prospek profitabilitas yang sesuai dengan resiko investasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Semarang merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di Jawa Tengah. Sebagai ibu kota provinsi, Semarang menawarkan banyak hal dalam berbagai aspek. Salah satu hal yang paling menonjol dari Semarang adalah lokalitas yang dimiliki. Seperti telah disinggung sebelumnya, lokalitas merupakan salah satu langkah paling tepat dalam memajukan kota. Globalisasi yang melenyapkan sekat-sekat pemisah antara negara dan kota membuat ciri khas lokal terancam, namun tidak bagi lokalitas Semarang.

Kearifan lokal Semarang yang tergambar dari berbagai nilai budaya melalui festival lokal menunjukkan potensi dari lokalitas Semarang yang mampu membawa Semarang maju sejauh ini. Pemerintah Kota Semarang sebagai stake holder utama terbilang jeli dalam menangkap dan memaksimalkan potensi lokalitas yang ada.

Berbagai jenis festival kebudayaan dan upaya penajaman lokalitas telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Beberapa upaya yang paling menonjol antara lain pencanangan Sem Biz dan Semarang Pesona Asia yang diimplementasikan pada periode kepemimpinan Wali Kota Sukawi. Kedua hal tersebut menjadi tonggak bangkitnya lokalitas kota Semarang dalam menantang arus globalisasi dan bertahan dalam terpaan modernisasi. Semarang berhasil tampil sebagai kota yang sukses mempertahankan lokalitas sebagai cara utama dalam memajukan kota.

Diplomasi lokal memberikan dimensi baru dalam mengakomodir kebutuhan akan aktualisasi lokalitas. Lokalitas dan Paradiplomacy merupakan satu kesatuan yang memberikan jalan bagi majunya pembangunan Kota Semarang. Paradiplomacy menyediakan ruang dan jalan bagi pemerintah lokal untuk menginisiasi dan melaksanakan diplomasi melintasi batas globalisasi. Diplomasi konvensional yang harus melibatkan pemerintah pusat tidak lagi menjadi keharusan, mengingat daerah yang paling memahami potensi dari lokalitas mereka sendiri.

Paradiplomacy juga memberikan alternative bagi daerah dalam membangun wilayah masing-masing. Usaha untuk menjalin kemitraan sister city menjadi salah satu

contoh baik bagaimana daerah diberikan kebebasan untuk memaksimalkan lokalitas masing-masing dan menggunakannya sebagai sarana memajukan potensi daerah.

Kerjasama yang dilakukan oleh Kota Semarang sejauh ini nampak membuahkan hasil positif. Kota Semarang tampil sebagai kota yang mengemuka dalam kaitannya dengan kondisi regional Jawa Tengah. Status Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah membuat setiap langkah strategis Kota Semarang menjadi cerminan bagi kemajuan Provinsi Jawa Tengah pula. Dengan demikian, kemajuan Kota Semarang menjadi nilai plus bagi pembangunan dan pengembangan lokalitas Jawa Tengah. Bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti Jawa Tengah mampu tampil mengemuka dalam melanjutkan apa yang sudah diinisiasi oleh Kota Semarang. Oleh karena itu, keberhasilan Kota Semarang dalam memajukan lokalitasnya menjadi inspirasi bagi terbukanya kesempatan bagi inisiasi lokalitas Jawa Tengah.

#### **4.2 Saran**

##### **1. Bagi Pemerintah Kota Semarang**

- a. Pemerintah Kota Semarang seyogyanya merawat dan memastikan keberlanjutan dari penggalan nilai-nilai lokalitas Semarang.
- b. Pemerintah Kota Semarang seyogyanya berkoordinasi lebih baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar penggalan nilai-nilai lokalitas Semarang dapat berjalan secara koheren dan sinergis.

##### **2. Bagi penelitian selanjutnya**

- a. Penelitian ini masih terbatas pada bagaimana proses Kota Semarang menginisiasi lokalitas setempat melalui Paradiplomacy. Selayaknya penelitian berikutnya mampu menganalisis bagaimana proses implementasi berjalan.
- b. Penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup periode kepemimpinan di masa lampau. Akan lebih baik jika penelitian selanjutnya dapat menawarkan pandangan bagaimana periode sekarang melanjutkan usaha menggali lokalitas Kota Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Anidu dkk, 2014: “*Implementasi Kerjasama Sister Schools Sma Negeri 3 Malang-River Valley High School Dalam Perspektif Diplomasi Publik*”, dalam [http://journalarticle.ukm.my/8462/1/Anidu\\_Alamsyah,\\_Imam\\_Hanafi\\_and\\_Manguku\\_Purnomo\\_41\\_%281%29\\_July\\_2014.pdf](http://journalarticle.ukm.my/8462/1/Anidu_Alamsyah,_Imam_Hanafi_and_Manguku_Purnomo_41_%281%29_July_2014.pdf).
- A. Epstein. Richard, 2013: “*Direct Democracy: GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, AND FOR THE PEOPLE?*” dalam *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 34. [http://www.harvard-jlpp.com/wp-content/uploads/2013/10/34\\_3\\_819\\_Epstein.pdf](http://www.harvard-jlpp.com/wp-content/uploads/2013/10/34_3_819_Epstein.pdf)
- A. Garner, Bryan (ed), 1999: *Black’s Law Dictionary seventh Edition*, St. Paul Minn, New York.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. n.d. *Banyaknya Angkatan Kerja di Kota Semarang 2012-2015*. Diakses 23 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/6>.
- \_\_\_\_\_. *Jumlah Pekerja di Kota Semarang 2012-2014*. Diakses 23 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/8>.
- \_\_\_\_\_. *Luas Penggunaan Lahan Kota Semarang 2012-2015*. Diakses 21 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26>.
- \_\_\_\_\_. *Realisasi Volume Ekspor Non Migas Menurut Sektor*. Diakses 22 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/27>.
- Barston, R. P, 2006: “*The Changing Nature of Diplomacy*” dalam *Modern Diplomacy*. New York: Pearson Education.
- Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY, 2006: “*Bunga Rampai: Kerjasama Luar Negeri*”.
- Conyers, D, 1984: “*Decentralization and Development: a Review of the Literature*”, *Public Administration and Development*, Vol. 4.
- Ekins, Richard, 2009: “*A Government for the People: The value of representative*” dalam [http://www.maxim.org.nz/site/Default Site/filesystem/documents/GP\\_Richard\\_Ekins\\_oct\\_09.pdf](http://www.maxim.org.nz/site/Default Site/filesystem/documents/GP_Richard_Ekins_oct_09.pdf).
- Fathun, L. M., 2016. *Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. Indonesian Perspective*, 1(1), pp. 75-94.
- Hadi, Umar., 2007: “*Diplomasi Publik Menjembatani Persepsi Domestik dan Internasional*”, *Tabloid Diplomasi Edisi Desember 2007*. <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/55-desember-2007/535->

[diplomasi-publik-menjembatani-persepsi-domestik-dan-internasional.html](#).

Diakses pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015.

Hermini S., 2013: “Prasyarat Keberhasilan Kerja Sama Sister Province: Studi Kasus Sister Province Antara Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian-Cina”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Undip*, Vol. 13, No. 2.

Hidayat, Syarif., 2008: “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif *State-Society Relation*”, Jurnal POELITIK Vol.1 No.1.

Kementerian Sekretariat Negara, 2007. *Semarang Pesona Asia 2007 Resmi Dibuka*.

Diakses pada 20 November 2016

[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=667](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=667)

Kuznetsov, A. S., 2015. *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.

Lazuardi, H., 2014. *Kawasan Industri Kota Semarang Hampir Penuh*. Diakses pada 29 November 2016 <http://kabar24.bisnis.com/read/20140508/78/226142/kawasan-industri-kota-semarang-hampir-penuh>

Lecours, A., 2008. *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Den Haag: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’.

Pemerintah Kota Semarang. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Semarang*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

\_\_\_\_\_. *Profil Kabupaten/Kota*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

\_\_\_\_\_. 2012. *Selayang Pandang Kota Semarang tahun 2012*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

\_\_\_\_\_. 2013. *LKPJ Walikota Semarang Tahun Anggaran 2013*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

\_\_\_\_\_. 2014. *Laporan Kegiatan: 8th Semarang Business Forum*, Semarang: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pikiran Rakyat, 2016. *Spirit Akulturasi Tiongkok-Jawa Hasilkan Budaya Peranakan*.

Diakses pada 29 November 2016

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/01/spirit-akulturasi-tiongkok-jawa-hasilkan-budaya-peranakan-376233>

Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 01/B/RO/IV/2015/01 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Luar Negeri,

[http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA\\_PK\\_LKJ/RENSTRA\\_KEMENLU%020152019\\_FINAL\\_DONE\\_SK%20MENLU\\_pdf\\_version.pdf](http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/RENSTRA_KEMENLU%020152019_FINAL_DONE_SK%20MENLU_pdf_version.pdf).

- Mawhood P. (ed), 1987: “*Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa*”, Chicheser: John Wiley & Sons.
- Mukti, Yandu Setiya, 2013: “*Keberhasilan Kerjasama Sister Province Jawa Timur Dengan Gyeongsangnam-Do Korea Selatan Tahun 2006-2012*”, dalam <http://repository.upnyk.ac.id/5735//>
- Niluh Wayan, Budiari, 2013: “*Faktor Pendorong Keberhasilan Kerjasama Sister Province Antara Pemerintah Jawa Timur Dengan Australia Barat (2007-2012)*”, <http://eprints.upnyk.ac.id/3267/>
- Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis & G. Shabbir Cheema, 1983: “*Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*”, Washington D.C.: The World Bank.
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Luas Penggunaan Lahan Kota Semarang 2012-2015*. Diakses pada 21 November 2016 <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26>
- Fathun, L. M., 2016. Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), pp. 75-94.
- Kementerian Sekretariat Negara, 2007. *Semarang Pesona Asia 2007 Resmi Dibuka*. Diakses pada 30 November 2016 [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=667](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=667)
- Kuznetsov, A. S., 2015. *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.
- Lazuardi, H., 2014. *Kawasan Industri Kota Semarang Hampir Penuh*. Diakses pada 29 November 2016. <http://kabar24.bisnis.com/read/20140508/78/226142/kawasan-industri-kota-semarang-hampir-penuh>.
- Lecours, A., 2008. *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Den Haag: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’.
- Pemerintah Kota Semarang, 2014. *Laporan Kegiatan: 8th Semarang Business Forum*, Semarang: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Pemerintah Kota Semarang, n.d. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Semarang*, Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Pikiran Rakyat, 2016. *Spirit Akulturasi Tiongkok-Jawa Hasilkan Budaya Peranakan*. Diakses pada 29 November 2016, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/01/spirit-akulturasi-tiongkok-jawa-hasilkan-budaya-peranakan-376233>.
- Roy, S. L., 1993: *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali.

- Ruland, J., 1993: “*Urban Development in Southeast Asia: Regional Cities and Local Government*”, Boulder: Westview Press.
- Seputar Semarang, n.d. *Kawasan Industri Semarang*. Diakses pada 29 November 2016. <http://seputarsemarang.com/tag/kawasan-industri/>.
- Setiadi, Rukuh, dan Samsul Ma'arif. 2009. "Pemetaan Isu dan Permasalahan Utama Pembangunan Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Riptek* 25-34.
- Sergunin, A. & Joenniemi, P., 2014. Paradiplomacy as a Sustainable Development Strategy: The Case of Russia's Arctic Subnational Actors. *Eurasia Border Review*, pp. 1-17.
- Sisk.Timothy D., et al., 2001: *Democracy At The Local Level*, International IDEA Handbook Series 4, Publications Office, International IDEA, Strömsborg, SE 103 34, Stockholm, Sweden.
- Smith, B.C., 1985: *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: Asia Publishing House
- Tavares, R., 2016. *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. New York: Oxford University Press.
- Thailand Convention and Exhibition Bureau, 2015. *Introduction to MICE Industry*. Diakses pada 30 November 2016. <http://msi.citu.tu.ac.th/uploads/news/file/20150820/en-bhlmprt01347.pdf>
- Van der Pluijm, Rogier & Jan Melissen. 2007. *City Diplomacy: The Expanding Role of the Cities in International Politics*. Hague: Netherlands Institute of International Relations.
- Windiani, Reni, 2013:” HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA OTONOMI DAERAH: *Studi Evaluasi Hubungan Sister Province (Provinsi Kembar) Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia Periode Tahun 2000– 2007.*, dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4934>.



## **LAMPIRAN**

### Lampiran 1 Susunan Organisasi

No.	Nama dan Gelar	Bidang Ilmu	Curahan Waktu (jam/minggu)
1.	Dra. Rr. Hermini S., M.Si	Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan	16
2.	Lusia Astrika, S.IP., M.Si	Ilmu Pemerintahan	16
3.	Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int.	Hubungan Internasional	16

## Lampiran 2 Biodata Ketua dan Anggota Tim Penelitian

### BIODATA PENELITI

#### I. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan Gelar) : Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M. Si
2. Jabatan Fungsional :
3. NIP : 19630422.198903.2.001
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Temanggung, 22 April 1963
5. Alamat Rumah : Jl. Tlogosari I No. 44 A RT 01/RW 01 Bulusan  
Tembalang Semarang Telp./Faks.  
: 024 76482700
6. No. HP : 08156641333
7. Alamat Kantor : Jl. Prof. H. Soedarto, SH No. 13 Kampus  
Undip  
Tembalang Semarang
8. Telp./Faks. : 024 7465407 /024 7465405
9. Alamat e-mail : herminis@undip.ac.id atau  
herminisq@yahoo.com
10. Mata Kuliah yang diampu : 1. Pengantar Ilmu Politik  
2. Teori Politik  
3. Lembaga dan Proses Politik Indonesia  
4. Kebijakan Publik  
5. Azas-Azas Manajemen  
6. Pancasila  
7. Manajemen Program Pembangunan

#### II. Riwayat Pendidikan

<b>Program</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>
<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	<b>UNDIP</b>	<b>UGM</b>	-
<b>Bidang Ilmu</b>	<b>Ilmu Pemerintahan</b>	<b>Ilmu Politik</b>	-
Tahun Masuk	1982	1991	
Tahun Lulus	1988	1995	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Petani Terhadap Tingkat Partiasipasi Politik di Kabutaen Temanggung	Proses dan Prospek Integrasi WNI Keturunan Cina di Singkawang	
Nama Pembimbing/Promotor	I. Drs. Hartono II. Drs. A. Hamid Widodo III. Dra. Endang HOK, SU	I. Prof. Yahya Muhaimin II. Prof. Ichlasul Amal III. DR. Budi Winarno	

### III. Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
1	2015	Pemilukada Dalam Pandangan Politik Wong Cilik Kota Semarang	Ketua	DIPA FISIP Undip
2	2014	Analisis Keterpilihan Denty Dalam Pemilu DPD RI 2014	Ketua	DIPA FISIP Undip
3	2013	Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri di Provinsi Jateng: Studi Kasus <i>Sister Province</i> Antara Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian-Cina	Ketua	BNOPTN
4	2012	Analisis Perbandingan Perran Politik Senat AS dengan DPD Indonesia	Ketua	DIPA FISIP Undip
5	2011	Evaluasi Pencapaian Program MDGs Provinsi Jawa Tengah	Ketua	DIPA FISIP Undip
6	2010	Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010	Anggota	DIPA FISIP Undip
7	2010	Evaluasi dan Pengembangan Model MBS di Wilayah Perdesaan di Jawa Tengah	Anggota	Balitbang Propinsi Jawa Tengah
8	2010	Implementasi UU NO. 14 Tahun 2008 Menuju Good Governance (Studi Kasus di Kabupaten Sragen dan Banjarnegara)	Anggota	Balitbang Propinsi Jawa Tengah

#### IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
1.	2015	"Pencegahan Praktek Kejahatan Ekonomi dalam Perdagangan Bebas: Origin Fraud dalam Industri Kerajinan Mebel Kayu di Jepara"	Anggota	DIPA FISIP Undip
2.	2015	"Tembakau Sebagai Identitas: Upaya Peningkatan Pengethun Petani Tembakau di Teanggung terhadap Fraud of Origin dalam Menghadapi Perdagangan Bebas"	Anggota	DIPA FISIP Undip
3.	2014	Meningkatkan Pengetahuan Peserta Didik Dari Kalangan Masyarakat Bawah". Di Kelurahan Meteseh Kota Semarang	Anggota	DIPA FISIP Undip
4.	2014	HI Mengajar : Upaya Peningkatan Taraf Pendidikan Kepemimpinan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	Anggota	DIPA FISIP Undip
5.	2013	Peningkatan Pengetahuan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tentang Peraturan Bekerja di Luar Negeri Serta Budaya Negara-Negara Tujuan	Anggota	DIPA FISIP Undip
6.	2012	Pengabdian Kepada Masyarakat; pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Komputer Bagi Pengurus dan Anggota Koperasi Curug Mandiri Di Desa Curug Sewu Kecamatan Patehan Kabupaten Kendal	Anggota	DIPA FISIP Undip
7.	2012	Penguatan Kelembagaan Lokal Dalam Rangka Pengembangan Mangrove Education Center dan Mangrove Tourism Center di Kawasan Tapak Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang"	Anggota	DIPA FISIP Undip
8.	2011	Pendampingan Pelaksanaan Administrasi Pembukuan Koperasi Serba Usaha Curug Mandiri di Desa Curug Sewu	Anggota	DIPA FISIP Undip

		Kecamatan Patehan Kabupaten Kendal		
9.	2011	Fasilitasi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai Upaya Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang	Anggota	DIPA FISIP Undip

#### V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
1	2014	Prasyarat Keberhasilan Kerjasama Sister Provice	Jurnal Ilmu Sosial Undip, Vol. 13 No. 2 Agustus 2014 ISSN: 1411 - 8254
2	2014	Kearifan Lokal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung	Majalah Forum Undip, Vol. 41 No. 1 Juni 2014, ISSN 0126-0731
3	2013	Pemilukada Miskin Figur	Suara Merdeka
4	2009	Menakar <i>Good Governance</i> di Pemerintahan SBY – Boediono 2009 – 2014	Forum FISIP Universitas Diponegoro
5	2009	Keterpurukan Pemilu DPD, 2009	Suara Merdeka

Biodata sebagai salah satu syarat dalam pengajuan usulan penelitian dan apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian, saya sanggup menerima sanksinya.

Semarang, 8 Nopember 2016  
Ketua Tim Pengusul,

Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si

## BIODATA PENELITI

### I. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap (dengan gelar) : Lusia Astrika, S.IP, M.Si
2. Jabatan Fungsional : Pengajar
3. NIP : 19850508 201012 2 005
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 8 Mei 1985
5. Alamat Rumah : Griya Grafika Citra Sentosa C2 / 9 Semarang
6. Telp./Fax : -
7. Nomor HP : 08122547860
8. Alamat Kantor : Jl Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang  
Kotak Pos 1269
9. Telp. / Fax : -
10. Email : lusia.astrika@gmail.com
11. Mata Kuliah yang diampu :
  1. Pengantar Ilmu Politik
  2. Metode Penelitian Ilmiah
  3. Etika Politik
  4. Studi Kependudukan
  5. Psikologi Kejahatan
  6. Sistem Hukum Indonesia
  7. Perbandingan Birokrasi dan Politik

### II. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	UNDIP	UNDIP
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Ilmu Politik
Tahun Masuk	2003	2007
Tahun Lulus	2006	2009
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Kemitraan Lembaga Swadaya Masyarakat Legal Resources Center Untuk Keadilan Jender dan Hak Azasi Manusia (LSM LRC-KJHAM) Bersama Pemerintah Kota Semarang Dalam Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang	Intensi Berpindah Partai Politik Ditinjau Dari Sikap dan Norma Subyektif Anggota Partai
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Priyatno Harsasto, MA	Drs. Purwoko, M.Si

### III. Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir)

No	Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota	Sumber Dana Jumlah (RP.)
1.	2014	Fenomenologi Calon Legeslatif Yang Depresi Karena Kalah Dalam Pemilu 2014	Ketua	DIPA FISIP Undip
2.	2013	Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Preventif Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang Akan Diberangkatkan ke Luar Negeri	Ketua	DIPA FISIP Undip
3.	2011	Politisasi Anggaran Jelang Pilkada (Studi Kebijakan dan Penggunaan APBD Kabupaten Blora Pada Pilkada 2010)	Ketua	DIPA FISIP Undip

### IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota	Sumber Dana Jumlah (RP.)
1.	2014	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Samoah Anorganik di Kelurahan Tandang Kota Semarang	Ketua	DIPA FISIP Undip
2.	2013	Peningkatan Peran Serta Perempuan Melalui Pengelolaan Homestay dan Usaha Warungan Dalam Mendukung Pengembangan Wisata Mangrove di Kawasan Tapak – Tugurejo Kota Semarang	Anggota	DIPA FISIP Undip
3.	2012	Pengabdian Masyarakat “Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Kelembagaan Lokal dalam rangka pengembangan Mangrove Education Centre & Mangrove Tourism Centre di Kawasan Tapak Kelurahan Tugurejo kecamatan Tugu kota Semarang	Anggota	DIPA FISIP Undip
4.	2011	Fasilitasi Penguatan LPMK sebagai upaya efektifitas program penanggulangan kemiskinan di kelurahan Mangunharjo & kel. Meteseh kec Tembalang Kota Semarang	Anggota	DIPA FISIP Undip



**V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir)**

No	Tahun	Judul Artikel	Penulis Utama/ Anggota	Nama Jurnal, Vol. No, Hlm	Terakreditasi / Belum terakreditasi
1.	2011	Intensitas Perpindahan Partai Politik: Sebuah Tinjauan Sikap dan Norma Subyektif Anggota Partai	Penulis Utama	Politika, Vol 2, No.2 (hlm. 83)	Belum Terakreditasi

## BIODATA PENELITI

### I. Identitas Diri

Nama Lengkap (dengan Gelar) : Fendy Eko Wahyudi, S.I.P., M.Hub.Int.  
Jabatan Fungsional dan Gol : Asisten Ahli/IIIb  
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 1 Juli 1987  
Nomor HP : 08125227048  
Alamat Kantor : Jl. Prof. Soedharto, SH No.13 Semarang  
Telp/Fax : 024-7465405  
Email : [f.e.wahyudi@undip.ac.id](mailto:f.e.wahyudi@undip.ac.id),  
[f.e.wahyudi@gmail.com](mailto:f.e.wahyudi@gmail.com)  
Mata kuliah yang diampu : 1. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional  
2. Ekonomi Politik Internasional  
3. Metode Penelitian HI  
4. Globalisasi & Transnasionalisme  
5. Organisasi & Administrasi Internasional

### II.

#### Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Institusi
1	S1	Undergraduate Program of International Relations, Department of International Relations, Universitas Airlangga
2	S2	Globalization & Strategic Studies, Department of International Relations, Universitas Airlangga
3	Diplôme DELF	Centre culturel et de Coopération Linguistique
4	Diplôme DELF	Institute Français d'Indonésie

### III. Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir)

No	Tahun	Judul Penelitian
1	2009	<i>Islamic Political Movements and Their Political Contestation in Indonesian institutionalized Democracy</i>
2	2009	Problem dan Solusi Perbatasan Indonesia : Kedaulatan, Integritas Bangsa, Pertahanan dan Sumber Daya Alam Strategis
3	2010	Studi Elektabilitas dan Popularitas Bakal Calon Walikota Surabaya
4	2011	<i>On Globalization and Culture: Cultural perception of Indonesian People in The Globalization era</i>
5	2012	<i>Moslem Women Perception on sharia and Khilafah perception in Indonesian Universities</i>
6	2013	Implementasi Kerjasama Sister Province Provinsi Jawa Tengah-Fujian
7	2013	Pemuda, Aktivisme Politik dan Media Baru
8	2014	Pengaruh Globalisasi terhadap Pandangan dan Aktivisme Kebudayaan Kelompok Pemuda di Jawa Tengah
9	2015	ISIS Vis a Vis Islamisme: Respon Gerakan Islam Transnasional terhadap Fenomena Kemunculan ISIS

**IV. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir)**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Artikel</b>	<b>Nama Jurnal, Vol, No, Hlm</b>
1	2010	Pengaruh Kausalitas Tingkat Fertilitas Total (TFR) Penduduk terhadap Tingkat Demokrasi : Tinjauan Demokrasi Gelombang ke-4 (1991-2000)	Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , Vol. 23 , Nomor 23 Juli-Sept 2010. ISSN 2086-7050
2	2010	Jalan Curam Hegemoni Amerika Serikat	Jurnal Global dan Strategis. Vol. 3 – No. 1 / 2010-03. Surabaya: Centre for Strategic and Global Studies.
3	2012	Globalisasi dan Desakralisasi Budaya: Tinjauan Dampak Globalisasi Terhadap Budaya	Majalah Pengembangan Ilmu Sosial “Forum”, Vol. 40 – No. 2. Oktober 2012, ISSN 0126-0731
4	2013	<i>Bridging between Transnational Islamism and Indonesian Islamic Tradition: The studies of Hizbut Tahrir Indonesia and Their Approach to The Ulema</i>	7th EuroSEAS Conference 2013 School of Social and Political Sciences – ISCSP University of Lisbon - Lisbon, 02-05 July 2013
5	2015	<i>Reviving the Silk Road between Fujian Province and the Central Java : contribution for future trade relationship</i>	<i>International Conference on “The Relation of Indonesia-China: Dynamics, Problems dan Prospects”</i>
6	2015	<i>Teatrikal Makroekonomisme Globalisasi</i>	Jurnal Ilmu Sosial Vol. 14, No. 2 Tahun 2015

Gambar 2.1  
Kota Semarang sebagai Venice Van Java

Jembatan Berok di Kampung Melayu



Rumah Pengasapan Ikan



Festival Perahu Warah di Banjir Kanal Barat Kota Semarang



Sumber: <http://semarangkota.go.id/>